

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pergerakan zaman mengikis segala bentuk kehidupan yang berada di dalamnya seiring dengan berjalannya waktu. Tidak luput juga warisan budaya dari zaman nenek moyang kita yang mulai berubah hingga dalam kondisi terburuk yaitu punah. Warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu. Warisan budaya masyarakat pada suatu daerah terbentuk melalui sejarah yang panjang yang terjadi secara turun temurun dari beberapa generasi (Karmadi dalam Antariksa, 2009).

Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan kejayaan maritimnya di masa lalu yang mampu menjadi catatan kebanggaan Indonesia terhadap dunia. Suku Bugis sebagai salah satu suku pelaut di Sulawesi Selatan terkenal dengan kegagahan dari Perahu Pinisi yang sekarang menjadi ikon Sulawesi Selatan. Perahu Pinisi sendiri merupakan perahu kayu yang mampu berlayar hingga ke batas-batas negara. Dalam proses pembuatannya, Perahu Pinisi menggabungkan kekuatan magis dan ketrampilan teknis yang menjadi sebuah warisan budaya bangsa Indonesia (Arief, 2009). Di Sulawesi Selatan, pusat pembuatan Perahu Pinisi bertempat di Kabupaten Bulukumba yang terkenal dengan nama Butta Panrita Lopi (Bumi Perahu Pinisi).

Keberlangsungan Perahu Pinisi tidak terlepas dari masyarakat Tanah Beru Bulukumba yang masih mempertahankan tradisi pembuatan kapal pinisi tradisional dengan menggunakan tata cara adat istiadat secara turun temurun. Menurut Antariksa (2009), warisan budaya pada suatu masyarakat tradisional dapat tercermin pada pola permukiman. Unsur budaya merupakan unsur pokok pembentuk pola permukiman dan gaya arsitektur bangunan huniannya. Permukiman pada dasarnya merupakan ekspresi budaya masyarakat dalam mengimplementasikan budayanya. Dalam pelaksanaan adat istiadat ini mengalami perubahan sehingga mengancam keberlanjutan identitas budaya setempat. Jika perubahan-perubahan terjadi secara terus menerus dan tidak dikendalikan akan

kehilangan identitas, dan oleh karena itu harus dipertahankan tatanannya. Permukiman merupakan suatu gejala struktural yang bentuk dan organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimilikinya, serta erat hubungannya dengan kehidupan penghuninya. Oleh karena itu, permukiman merupakan serangkaian hubungan antara benda dengan benda, benda dengan manusia, dan manusia dengan manusia. Hubungan ini memiliki suatu pola dan struktur yang terpadu (Rapoport dalam Sudirman Is dalam Valentina, 2008).

Terbentuknya suatu pola permukiman sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Masyarakat dalam membentuk lingkungan huniannya yang baru di tempat yang berbeda dari tempat asalnya, akan selalu mengikuti kebudayaan dan sistem kepercayaan yang mereka pegang teguh di lingkungan hunian mereka yang lama. Hal ini dapat dilihat pada upaya masyarakat tersebut dalam memodifikasi lingkungan huniannya yang baru (Sumintardja dalam Antariksa, 2009).

Dalam proses pembuatannya, Perahu Pinisi ini dipengaruhi oleh adat istiadat yang membentuk pola spasial masyarakatnya dalam bermukim. Runtutan tradisi dan upacara yang membentuk ruang-ruang kegiatan komunal menjadikan masyarakat Bonto Bahari memiliki karakteristik dalam pola permukimannya. Proses pengerjaan Perahu Pinisi mulai dari pemilihan bahan, proses pembuatan, hingga melepaskan perahu menuju ke laut merupakan suatu tradisi yang dilakukan dengan hukum adat sebagai dasarnya menjadikan Perahu Pinisi ini tidak hanya dipandang sebagai kendaraan angkutan laut biasa tetapi menjadi peninggalan budaya yang harus dilestarikan. Selain dalam ritualnya, Perahu Pinisi yang memiliki panjang antara 10-30 meter ini tentu saja membutuhkan area wilayah terbuka yang luas dalam perakitannya yang akan dikerjakan oleh para pembuat perahu secara bersama-sama. Masyarakat Bugis-Makassar memiliki keyakinan bahwa hanya masyarakat dari Tanah beru ini saja yang memiliki kemampuan untuk membuat Perahu Pinisi.

Seiring semakin meningkatnya pesanan pembuatan Perahu Pinisi khususnya dari mancanegara dengan sistem kontrak kerja termasuk waktu penyelesaian yang diawali sekitar akhir tahun 1990-an hingga saat ini, maka

proses pembuatan dan peralatan yang digunakan sudah mulai banyak berubah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu pembuatan. Demikian halnya dengan ritual-ritual (upacara) dalam pembuatan perahu sudah mulai banyak pula ditinggalkan (Arief,2009). Menurut Arman Yusuf dalam Upaya Pelestarian Perahu Pinisi dalam Memperkokoh Identitas Bangsa, saat ini kebudayaan pinisi telah memudar yang dapat terlihat pada pergeseran nilai budaya, kurangnya minat generasi muda, dan berkurangnya bahan baku. Nilai budaya yang telah mengalami pergeseran adalah cara pembuatan dan modifikasi bentuk. Masyarakat Tanah Beru sudah tidak lagi mengikuti runtutan tata upacara pembuatan Perahu Pinisi. Sedangkan untuk bentuk kapal pinisi telah mengalami perubahan bentuk diakibatkan permintaan modifikasi oleh pemesan kapal sehingga sulit untuk menemukan kembali bentuk asli dari pinisi. Regenerasi yang kurang berhasil juga turut menjadi penyebab memudarnya kebudayaan pinisi di tanah kelahirannya. Generasi muda di Tanah Beru cenderung memilih pekerjaan lain dan tidak meneruskan keahlian membuat pinisi. Kurangnya bahan baku di daerah Bulukumba saat ini menyebabkan banyak pekerja yang hijrah ke luar pulau. Menurut Kadisbudpar Bulukumba, perpindahan pengrajin akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pinisi yang juga akan menjadi kerugian bagi daerah Bulukumba sendiri. Saat ini pengrajin Perahu Pinisi yang masih terus mengerjakan Perahu Pinisi ini hanya terdiri dari 11 kelompok pengrajin. Dengan demikian keberlangsungan Perahu Pinisi sebagai kebudayaan dari Bugis Makassar sangat besar dipengaruhi oleh cara hidup dan interaksi masyarakat Tanah Beru dengan alam lingkungannya.

Kabupaten Bulukumba sebagai tanah kelahiran Perahu Pinisi, mengusahakan keberlangsungan Perahu Pinisi melalui penancangan wilayah Tanah Beru dan Tanah Lemo sebagai Kawasan Industri Kapal Rakyat. Hanya saja, fokus pemerintah lebih kepada Perahu Pinisi sebagai objek kebudayaan tanpa melihat adanya masyarakat Tanah Beru-Tanah Lemo sebagai bagian penting dalam proses kebudayaan Perahu Pinisi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 9 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan, fungsi utama Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan Perahu Pinisi sebagai kawasan industri/maritim.

Selain itu, usaha-usaha penelitian yang dilakukan pemerintah dan akademisi lebih mengamati kegiatan sepanjang pesisir pantai sebagai bagian terpisah dari wilayah Tanah Beru secara keseluruhan. Penelitian dilakukan dengan mengeksplorasi pinisi melalui konstruksi pembuatannya, material, hingga transformasi pembuatan.

Sebagai suatu kesatuan, kebudayaan pinisi merupakan serangkaian proses berbudaya yang tidak hanya terdiri dari pinisi sebagai objek tetapi juga kegiatan berbudaya masyarakat Tanah Beru yang tercermin dalam pola ruangnya. Koentjaraningrat (2009) mengungkapkan juga “Sosial kultural” pada suatu tempat akan selalu berbeda sehingga perlu pengkajian pola ruang yang mempunyai nilai spesifik pada sebuah tempat yang mempunyai budaya dan tatanan adat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba sebagai upaya mempertahankan keberadaan Perahu Pinisi sebagai kebudayaan yang utuh.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Isu mudahnya kebudayaan pinisi sebagai warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang ditandai oleh berkurangnya jumlah pengrajinnya, pergeseran ritual adat yang dilakukan, dan berkurangnya partisipasi masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Bulukumba saat ini lebih fokus kepada Perahu Pinisi sebagai objek kebudayaan tanpa melibatkan masyarakat Tanah Beru sebagai bagian dari proses kebudayaannya sehingga keadaan ekonomi masyarakat menjadi kurang berkembang dan berdampak pada masyarakat yang mulai meninggalkan profesi pengrajin.
3. Penelitian mengenai Perahu Pinisi terfokus pada pesisir pantai pembuatan perahu dan dianggap terpisah dengan kesatuan wilayah masyarakat Tanah Beru sehingga potensi masyarakat Tanah Beru menjadi kurang terekspos dan memberi dampak perbaikan / pengembangan hanya pada wilayah pesisir sebagai area pembuatan perahu pinisi dan tidak menyentuh kawasan permukiman.

### 1.3. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi “Pola Tata Ruang Permukiman Pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba sebagai dasar arahan penataan permukiman pengrajin Perahu Pinisi yang sesuai dengan budaya pengrajinnya dalam rangka meningkatkan kualitas permukimannya?

### 1.4. Batasan Masalah

Skripsi ini dilakukan berdasarkan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan mengenai pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba yang terdiri dari batasan fisik dan non fisik dengan cakupan sebagai berikut :

1. *Batasan Fisik* mencakup kondisi geografis objek studi, elemen fisik permukiman, aksesibilitas, tata letak bangunan dan fasilitas umum pada lokasi penelitian
2. *Batasan Non Fisik* mencakup :
  - a. bidang sosial, yaitu interaksi bersama masyarakat pengrajin dan non pengrajin di Tanah Beru
  - b. bidang budaya, meliputi ritual atau upacara sehubungan dengan proses pembuatan Perahu Pinisi, baik penggunaan ruang dan pergerakan masyarakat dalam upacara tersebut.

### 1.5. Tujuan Penelitian

Skripsi dengan judul “Pola Tata Ruang Permukiman Pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan” ini bertujuan mengetahui pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba untuk dijadikan dasar memberikan konsep penataan permukiman pengrajin pinisi dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman pengrajinnya.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsih dalam penataan kawasan permukiman pengrajin Perahu Pinisi ini ke depannya untuk terus menjaga keberlangsungan produk kebudayaan Perahu Pinisi sebagai warisan kebudayaan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi :

#### **1. Akademis**

Diharapkan dapat memberikan pengkayaan pengetahuan terhadap kebudayaan pinisi dan dunia arsitektur terlebih khusus mengenai pola permukiman tradisional yang terkait dengan kegiatan berbudaya.

#### **2. Pemerintah**

Diharapkan dapat memberikan gambaran kebudayaan Perahu Pinisi secara menyeluruh yang melibatkan masyarakat Tanah Beru sebagai bagian yang tidak terlepas. Selain itu dapat menjadi usulan dalam perbaikan penataan permukiman yang solutif sekaligus menjadi potensi wisata yang dapat memberikan manfaat bagi pendapatan daerah.

#### **3. Masyarakat**

Diharapkan dapat menjadi wacana bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan pinisi melalui kegiatan bermukim dan berbudaya. Selain itu, dengan adanya rekomendasi penataan, diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat Tanah Beru sebagai tanah kelahiran budaya Perahu Pinisi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan dan bab yang terakhir ialah penutup. Penulisan dilakukan berdasarkan urutan penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang diangkatnya penelitian ini yaitu mengenai isu memudarnya kebudayaan Perahu Pinisi di Bulukumba yang sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan permukiman masyarakat Tanah Beru sebagai pengrajinnya. Belum adanya perhatian dari pemerintah terkait kebudayaan pinisi sebagai suatu kesatuan dengan permukimannya mengerucut pada rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimana pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, ditetapkannya batasan-batasan masalah dalam penelitian ini berupa aspek fisik dan non fisik. Dari rumusan masalah tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian yang diharapkan menjawab rumusan masalah. Selanjutnya diuraikan harapan manfaat penelitian bagi pihak pemerintah, akademis dan masyarakat di Tanah Beru.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian teori-teori pola tata ruang permukiman dan arahan penataan melalui literatur yang dapat mendukung peneliti dalam pembahasan dan analisis yang dilakukan. Kajian teori juga berasal dari tinjauan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penulisan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah studi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang objek penelitian dan tahapan penelitian yang digunakan. Uraian objek penelitian mencakup gambaran wilayah studi dan populasi/ sampel yang digunakan. Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah penelitian dari perumusan gagasan, tahap pendahuluan berupa kegiatan observasi awal, pengumpulan data, pengolahan data hingga proses analisa yang dilakukan sehingga didapatkan kesimpulan akhir penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian analisis data secara menyeluruh yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada BAB II. Pembahasan terbagi menjadi tiga yaitu analisis tinjauan umum wilayah penelitian, analisis kelima elemen pembentuk pola tata ruang dan rekomendasi penataan menanggapi hasil dari analisis.

## BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan akhir dari temuan-temuan yang merupakan hasil analisis dan rekomendasi penataan dalam proses penelitian dan saran berupa kontribusi ke penelitian selanjutnya dan wawasan ilmu arsitektur.

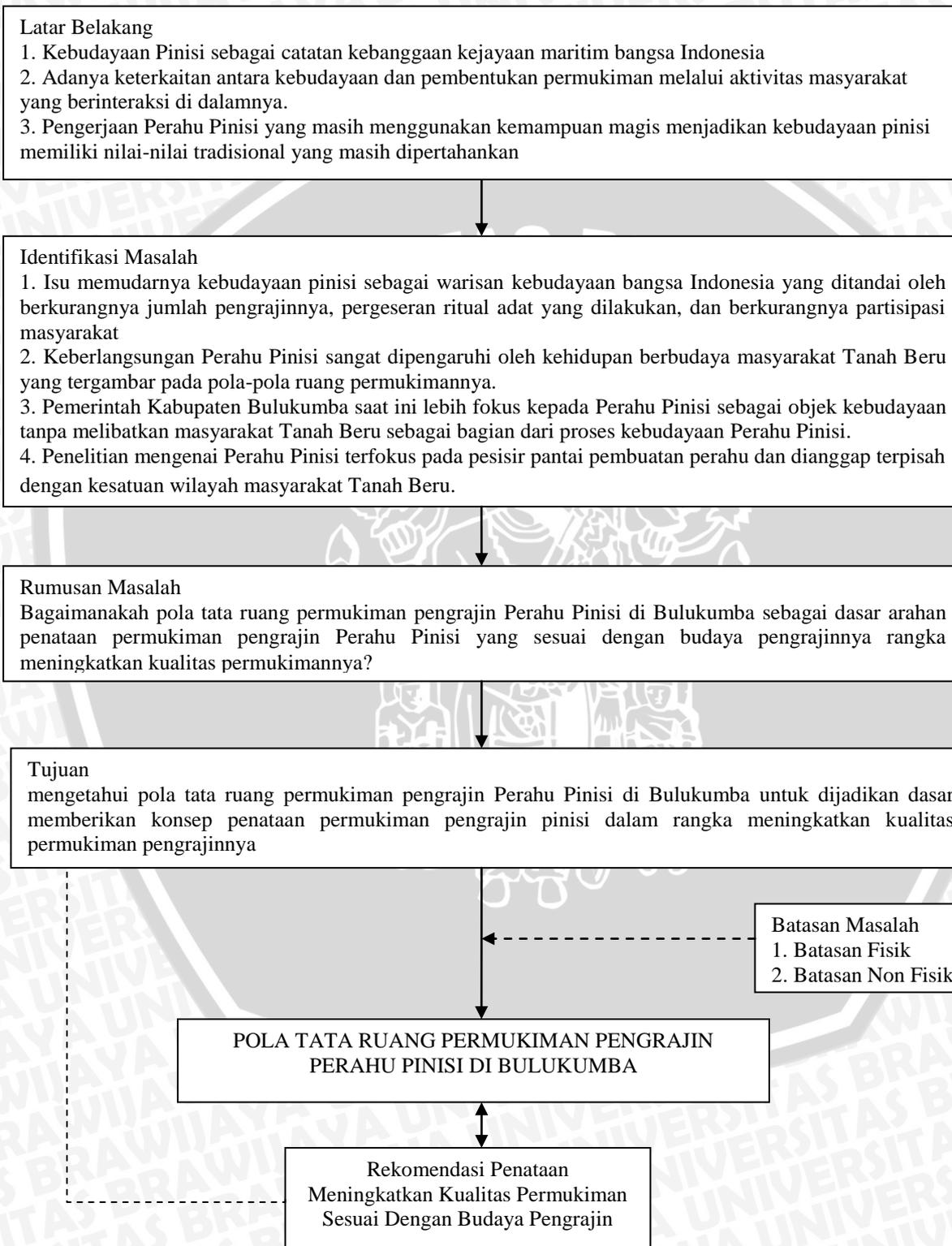
### 1.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berangkat dari latar belakang nilai kebudayaan pinisi sebagai catatan kejayaan maritim bangsa Indonesia dan keterkaitan antara kebudayaan dan pembentukan permukiman melalui aktivitas masyarakat yang berinteraksi di dalamnya. Pengerjaan Perahu Pinisi oleh masyarakat Tanah Beru yang masih menggunakan kemampuan magis menjadikan kebudayaan pinisi memiliki nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan dan akan tampak pada pola penggunaan ruangnya.

Permasalahan yang dapat teridentifikasi ialah isu memudarnya kebudayaan pinisi yang sangat dipengaruhi kehidupan berbudaya masyarakat Tanah Beru sebagai tanah kelahiran Perahu Pinisi. Kabupaten Bulukumba dan penelitian yang dilakukan dalam melestarikan kebudayaan pinisi hanya fokus terhadap pinisi sebagai hasil kebudayaan tanpa melibatkan masyarakat Tanah Beru sebagai bagian dari proses kebudayaannya.

Berdasarkan hal tersebut, mengerucut pada permasalahan penelitian ini untuk menemukan tujuan dari penelitian yaitu mengetahui pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba untuk dijadikan dasar memberikan konsep penataan permukiman pengrajin pinisi dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman pengrajinnya.

Dengan batasan masalah yang telah ditetapkan digunakan untuk menghasilkan pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi untuk kemudian diberikan rekomendasi penataan untuk menjawab tujuan penelitian.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum

##### 2.1.1. Defenisi judul

*Pola* adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu/, atau bagian dari sesuatu. Khususnya jika sesuatu yang timbul cukup mempunyai sesuatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola (Wikipedia, 2009)

*Tata ruang* adalah lingkungan fisik tempat terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu (Rapoport, 1989)

*Permukiman* adalah dapat diartikan sebagai sejumlah besar rumah yang terletak pada kawasan tertentu, yang dapat berkembang, atau diadakan dan dikembangkan untuk dapat mengakomodasi sejumlah besar keluarga yang memerlukannya. Berkembang dapat diartikan sebagai tumbuh secara organis tanpa macam-macam pemikiran, sedang diadakan dan dikembangkan berarti telah menempuh berbagai proses dan pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan. (Hermanislamet, 1993).

Jadi dapat disimpulkan pola tata ruang permukiman adalah bentuk/ model tatanan hubungan organisatoris antara sejumlah besar rumah dengan manusia dan perkembangannya dalam pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan.

##### 2.1.2. Kebudayaan Perahu Pinisi

###### A. Sejarah Perahu Pinisi

Menurut Arief (2009), ada beberapa versi mengenai asal usul Perahu Pinisi. Versi yang pertama mengatakan bahwa Perahu Pinisi adalah buatan bangsa Prancis dan Jerman. Hal ini diperkuat oleh adanya tulisan dari peneliti asing

mengenai seseorang yang berketurunan Prancis-Jerman yang bernama Martin Perrot yang melarikan diri ke Kuala Trengganu. Di sana ia menikahi seorang gadis Melayu. Di sana ia bekerja sebagai tukang kayu. Pada suatu hari, Raja Trengganu, Sultan Baginda Omar, memerintahkan untuk membuat sebuah perahu yang menyerupai perahu dari negeri Barat. Mendapat perintah itu, ia pun membuat perahu layar yang bertiang dua. Dan, itu mirip dengan Perahu Pinisi yang ada sekarang.

Versi lainnya, khususnya dari daerah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa Perahu Pinisi sudah ada sekitar abad ke-14 atau 16 Masehi. Orang yang pertama membuatnya adalah putera mahkota kerajaan Luwu yang bernama Sawerigading. Tokoh ini merupakan tokoh legendaris yang ada dalam Lontarak I babad La Galigo. Dalam babad tersebut diceritakan bahwa suatu hari, ketika Sawerigading pulang dari pengembaraannya, ia melihat saudara kembarnya (Watenri Abeng) dan jatuh hati kepadanya. Tentu saja hal ini membuat marah ayahnya (Raja Luwu). Untuk menghibur hati Sawerigading, Watenri Abeng menyuruhnya untuk pergi ke negeri Tiongkok, karena di sana konon ada seorang puteri yang wajahnya mirip dengannya. Puteri Tiongkok tersebut bernama We Cudai. Namun, untuk dapat pergi ke sana diperlukan perahu yang tangguh dan kuat. Sementara, Sawerigading tidak memilikinya. Padahal, untuk membuatnya diperlukan kayu yang berasal dari pohon welengreng atau pohon dewata yang adanya di daerah Mangkutu. Celakanya, pohon tersebut dianggap keramat, sehingga tidak ada orang yang berani menebangnya. Untuk itu, diadakanlah upacara besar-besaran yang bertujuan agar penunggu pohon bersedia pindah ke tempat atau pohon lain. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh neneknya yang bernama La Toge Langi (Batara Guru). Konon, setelah pohon welengreng tumbang, pembuatan perahu dibantu oleh neneknya dan dilakukan secara magis di dalam perut bumi. Ketika perahu sudah jadi, Sawerigading pun berangkat ke negeri Tiongkok. Ia bersumpah tidak akan kembali ke Luwu.

Singkat ceritera, Sawerigading berhasil mempersunting Puteri We Cudai dan tinggal di negeri Tiongkok. Setelah lama di sana, ia rindu pada tanah kelahirannya. Dan, suatu hari ia berlayar menuju Luwu. Namun, ketika perahu

hendak berlabuh di pantai Luwu, tiba-tiba ada gelombang besar yang menghantamnya, sehingga pecah. Kepingan-kepingannya terdampar di beberapa tempat. Sebagian badannya terdampar di pantai Ara, tali temali dan layar perahu terdampar di daerah Tanjung Bira, dan lunas perahu terdampar di daerah Lemo-Lemo. Dan, oleh orang-orang yang tinggal di ketiga daerah tersebut, kepingan-kepingan tadi disusun kembali, sehingga ada kepercayaan bahwa nenek moyang merekalah yang merekonstruksi perahu milik Sawewigading yang kemudian dikenal sebagai pinisi. Demikianlah, sehingga keturunannya mewarisi keahlian-keahlian tertentu dalam pembuatan, bahkan mengemudi pinisi. Dalam konteks ini, orang Ara ahli dalam membuat tubuh dan bentuk perahu; orang Lemo-lemo ahli dalam finishing perahu; dan orang Tanjung Bira ahli mengemudi perahu (nahkoda dan awal perahu). Kekhasan-kekhasan itulah yang kemudian memunculkan ungkapan yang berbunyi: "Panre patangan'na Bira, Paingkolo tu Arayya, Pabingkung tu Lemo Lemoa", artinya "ahli melihat dari Bira, ahli memakai singkolo (alat untuk merapatkan papan) dari Ara, dan ahli menghaluskan dari Tana Lemo". Berdasarkan ungkapan itu, maka banyak orang yang meyakini, khususnya orang Bugis-Makassar, bahwa Perahu Pinisi yang bagus (sempurna) adalah pinisi yang dibuat oleh orang Ara dan Tana Lemo.

#### B. Tradisi Pembuatan Perahu Pinisi

Pembuatan Perahu Pinisi pada masa lalu (sebelum era 1990-an), masalah ritual sangat disakralkan, makna integratif dari kepercayaan mengenai mitos, ritus, fetis, magic dan kultus terhadap kegiatan pembuatan Perahu Pinisi telah menjadi motivasi tersendiri yang tertafsirkan sebagai kekuatan pelengkap bagi keahlian yang dilaksanakan dengan baik dan memberikan "pengaruh psikologis" yang membuat keyakinan akan keberhasilan dari pekerjaan yang dilakukan atau semacam bimbingan alamiah yang diperoleh dari kepercayaan yang diyakininya (Andi Adri dalam Malinowski, 1922; Smellser, 1987; Sallatang; Arief, 2007; Saenong, 2007).

Sementara peralatan yang dimiliki oleh para pembuat perahu pada masa lalu masih terbatas kepada peralatan tradisional seperti : (1). Gergaji, (2). Bor kecil, (3). Bor tangan, (4). Palupalu, (5). Penjepit, (6). Tali patron, (7). Pahat kecil, (8). Palu kayu, (9). Syehmat, (10). Kampak. Dan lain-lain. Selain peralatan juga

dikenal bahanbahan tradisional seperti (1). Pasak kelli sebagai penyambung antar papan, (2). Pasak tulang sebagai penghubung papan dengan tulang dalam pembuatan rangka perahu, (3). Pasak lunas sebagai lunas dengan papan pengikat, (4). Lem, Bahan dari kulit kayu dan air yang ditumbuk, berfungsi merapatkan sambungan papan secara permanent (5). Lepa, dempul dari campuran kapur dan minyak kelapa lalu dikentalkan, berfungsi menutup lubang papan.

Tabel 2.1 Upacara Pembuatan Perahu Pinisi Sebelum Tahun 1990an

KOMPONEN KEGIATAN	NILAI DAN NORMA	MAKNA INTEGRATIF	PENGARUH PSIKOLOGIS
Penentuan hari pencarian kayu (bahan baku)	Hari kelima atau ketujuh pada bulan berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka lima (<i>naparilimai dalle'na</i>)</li> <li>• Angka tujuh (<i>natujuangngi dalle'na</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezeki sudah di tangan</li> <li>• Selalu dapat rezekin</li> </ul>
Penentuan pohon yang ditebang	Upacara <i>annakbang kalabiseang</i> , menyembelih seekor ayan sebagai persembahan.	Untuk mendapatkan persetujuan kepada pohon yang ingin ditebang.	Mengusir roh penghuni kayu yang ditebang.
Pemotongan lunas	Upacara <i>annattara</i> , potongan ujung lunas tidak boleh menyentuh tanah, bagian depan dibuang ke laut, bagian belakang disimpan di rumah.	Balok lunas bagian depan (simbol lelaki), bagian belakang symbol wanita.	Simbol suami yang siap melaut untuk mencari nafkah dan istri yang setia menunggu rezeki
Penentuan pusat perahu	Upacara <i>ammosi</i> , pemberian pusat perahu.	Simbol "kelahiran bayi" perahu.	Penyerahan sang bayi perahu kepada Nabi Sulaeman (penguasa bumi) dan Nabi Haidir (penguasa laut).

Sumber : Arif (2009)

Tabel 2.2. Perubahan Penggunaan Alat Kerja

NO	AKTIVITAS/ KOMPONEN	PERUBAHAN		KETERANGAN
		Tradisional	Modern	
1	Peralatan Kerja	Bor Tangan Ketam Tangan Gergaji Tangan Amplas Manual Pasak Lem Tradisional	Bor Listrik Ketam Listrik Gergaji Listrik Amplas Listrik Baut dan Mur Lem Sintetis	Efisiensi Ikerja 10 : 1
2	Nilai dan norma budaya	Ritual penebangan pohon Ritual peluncuran perahu	Kayu dibeli langsung Tergantung keinginan pemesan	Efektifitas dan efisiensi
3	Organisasi kerja	Ponggawa, Sawi	Juragan, Ponggawa, dan Sawi	Semenjak ada pemesan luar negeri

Sumber : Arif (2009)

### C. Pola dan Hubungan Kerja dalam Pembuatan Perahu Pinisi

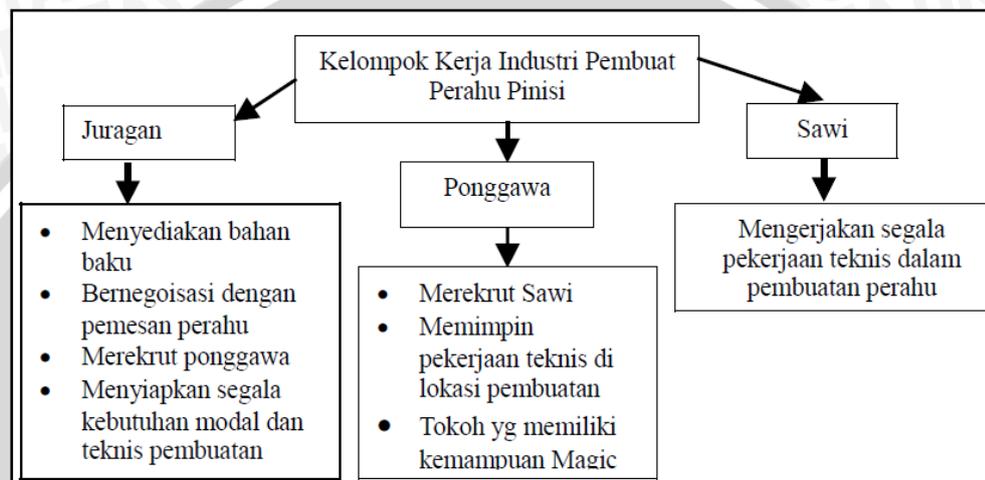
#### 1. Sistem Perekrutan Tenaga Kerja.

Perekrutan tenaga kerja dalam pembuatan Perahu Pinisi berawal dari perekrutan *pongawa* oleh pengusaha perahu (*juragan*) yang sifatnya temporer, karena ikatan kerja antara pengusaha dan *pongawa* hanya bersifat kontrak, yaitu hubungan kerja yang terbatas kepada jangka waktu pekerjaan. Perekrutan *pongawa* atau kepala tukang oleh pengusaha perahu didasarkan kriteria; antara lain : (1). Kemampuan dalam membuat perahu, (2). Kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan secara baik dan rapi, (3). Kemampuan dalam menyelesaikan perahu tepat waktu (4) kemampuan memimpin kelompok kerja serta (5) kemampuan Magic. Selain kemampuan yang disebutkan diatas tidak sedikit juga kasus perekrutan *pongawa* karena faktor kedekatan emosional, seperti sering-tidaknya bekerjasama dengan pengusaha yang akan merekrutnya serta adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka (*pongawa* dengan pengusaha perahu atau *juragan*).Perekrutan tenaga kerja teknis/*sawi* dalam industry pembuatan Perahu Pinisi sepenuhnya diserahkan kepada *pongawa*, hal ini dimaksudkan karena *pongawa* yang memiliki kompetensi dalam menilai tenaga kerja yang akan diajak bekerjasama dalam teknis pembuatan perahu. System perekrutan yang dilakukan *pongawa* untuk merekrut *sawi* sangat terbuka, tidak hanya terbatas kepada system perekrutan berdasarkan pertimbangan kerabat

atau keluarga, tetapi juga pertimbangan kemampuan teknis *sawi* dalam pembuatan perahu, biasanya dalam perekrutan orang luar selain keluarga, *pongawa* mendapat rekomendasi dari *sawi* atau kenalannya sesama *pongawa*.

2. *Pembagian Peran dan Fungsi dalam Pembuatan Perahu*

Secara skematik gambaran secara umum fungsi dan peranan kelompok pembuat Perahu Pinisi dapat dilihat sebagai berikut :

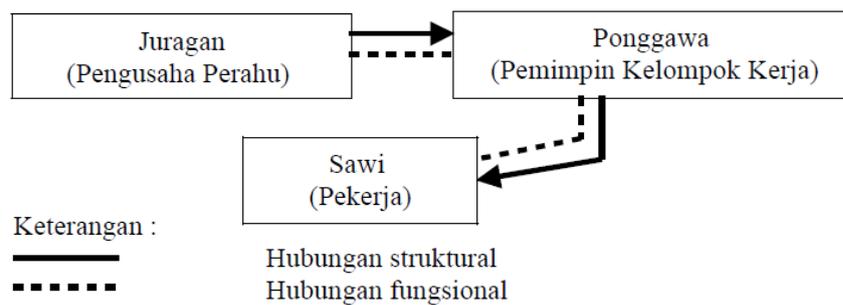


Gambar 2.1 Fungsi dan Peranan Kelompok Kerja

Sumber : Arif (2009)

Secara terinci pembagian peran dan fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Pengusaha perahu (*juragan*). Meskipun posisi dari pengusaha perahu berada pada jabatan tertinggi, kewenangannya hanya sebatas menyediakan modal dan peralatan teknis. *Juragan* tidak boleh mencampuri urusan teknis pembuatan, walaupun pengusaha sangat terdesak sekali untuk penyelesaian masalah keterlambatan penyelesaian atau adanya masalah dengan *sawi* maka harus lewat izin dari *pongawa* untuk mengambil keputusan mengenai masalah teknis pekerjaan atau hal yang berhubungan dengan *sawi*. Tugas atau peran dari seorang pengusaha hanya terbatas kepada negoisasi dengan pemesan dalam hal ini pembeli perahu baik yang lokal maupun pembeli dari luar negeri, pembelian bahan baku, mengatur keuangan/membuat pembukuan pengeluaran, menyiapkan dana tambahan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, mengelola ketersediaan bahan baku mulai dari awal sampai penyelesaian pekerjaan. (2). *Ponggawa* (pemimpin

kelompok). Dalam pembuatan perahu *pongawa* memiliki fungsi dan peran sebagai berikut : pimpinan teknis dalam pembuatan perahu, mengontrol kerja *sawi*, menilai hasil kerja *sawi*, membagikan upah *sawi*, mempersiapkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh *sawi*, sebagai guru bagi *sawi* di lokasi pembuatan, mendesain bentuk dan besar kapal sesuai pesanan, dan sebagai tokoh yang memiliki kemampuan magic, untuk dipergunakan dalam upacara pembuatan perahu dan peluncuran perahu. (3) *Sawi* (buruh atau pekerja). *Sawi* adalah pekerja teknis dalam pembuatan perahu yang berada dalam instruksi dan pengawasan kerja oleh *pongawa*. *Sawi* menempati strata pekerjaan yang paling dibawah karena posisinya..Tugas dan peran *sawi* sendiri adalah terlibat langsung dalam teknis pembuatan perahu mulai dari awal hingga selesai. Tahapan pekerjaan tersebut adalah : (a).pemasangan lunas, (b). pemasangan linggi depan, (c) pemasangan linggi belakang, (d).susun papan, (e). pemasangan tulang kapal, (f). pemasangan gading kapal, (g). lepa, (h). pemasangan kalang geladak, (i). pemasangan balok-balok pinggir, (j). pembuatan dek, (k). pembuatan kamar. Spesialisasi seorang *sawi* tidak tergambar dengan jelas, artinya pekerjaan yang dilakukan oleh *sawi* tidak berdasarkan dengan spesialisasi kerja. Ini terjadi karena didalam pembuatan perahu seluruh *sawi* dituntut untuk terampil dalam segala bentuk pengerjaan perahu. Konteks ini memperlihatkan bahwa Diferensiasi fungsi dalam kelompok kerja khususnya bagi kalangan *sawi* tidak tercipta karena tidak adanya pembagian secara khusus bahwa *sawi* ini hanya mengerjakan pemotongan papan, yang satunya lagi hanya mengerjakan pemboran. Semuanya tergantung dari perintah dari *pongawa*. Sehingga *sawi* akan selalu siap dengan pekerjaan yang diberikan oleh *Pongawa*, Meskipun peralatan teknologi modern mulai diintroduksi dalam kegiatan pembuatan perahu. Konteks ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat nelayan seperti yang ditulis oleh Arief (2007) bahwa dengan masuknya modernisasi dalam kegiatan penangkapan ikan menyebabkan terjadinya diferensiasi fungsi dikalangan *sawi*, *sawi* tidak dapat lagi digeneralisasi secara umum, tetapi segalanya telah tercipta pembagian-pembagian peran yang tergambar dalam sistem bagi hasil.



Gambar 2.2 Jalinan Hubungan Kerja Organisasi

Sumber : Arif (2009)

## 2.2. Tata Ruang Permukiman

### 2.2.1. Tata ruang

Menurut Rapoport dalam Antariksa (2011), pengertian tata ruang merupakan lingkungan fisik tempat terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu. Ketataruangan secara konseptual menekankan pada proses yang saling bergantung antara lain : 1. Proses yang mengkhususkan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tersebut; 2. Proses pengadaan ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang *basic* aktivitas seperti bentuk tempat kerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi; dan 3. Proses pengadaan dan penggabungan tatanan ruang ini antara berbagai bagian-bagian permukaan bumi, yang mana ditempatkan berbagai aktivitas dengan bagian atas ruang angkasa, serta kebagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya sehingga perlu dilihat dalam wawasan yang integratik.

Dalam lingkup kota, suatu kota yang merupakan pusat kegiatan usaha terdiri dari berbagai unsur ruang dan unsur-unsur ruang kota ini akan membentuk struktur kota. Proses pembentukan ini akan berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Struktur ruang dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu 1. Struktur Sosial, merupakan struktur yang menggambarkan adanya tingkat perhubungan dengan kondisi sosial dalam ruang; 2. Struktur Ekonomi, menggambarkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terselenggara oleh penduduk; dan 3. Struktur Fisik dan Kegiatan, menampilkan bentukan-bentukan fisik ruang yang diidentifikasi dengan pengelompokan fasilitas, kegiatan di lokasi tertentu.

Ruang-ruang terbentuk karena kegiatan/aktifitas masyarakat, menurut Ronels dalam Sasongko (2005), sistem kegiatan dilihat dari pola perilaku digolongkan menjadi tiga, yaitu 1. Sistem kegiatan rutin yakni aspek kegiatan utama individu meliputi pergi belanja. ke kantor dan sebagainya; 2. Sistem kegiatan berlembaga, yakni kegiatan kelembagaan baik swasta maupun pemerintahan yang difokuskan pada particular point; dan 3. Sistem kegiatan yang menyangkut organisasi dari pada proses-prosesnya sendiri yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks dengan berbagai sistem kegiatan lain baik dengan perorangan, lembaga/kelompok tercipta lingkungan (pertanian yang sangat banyak dalam satu sistem saja).

### 2.2.2. Pola permukiman

#### A. Elemen pembentuk pola permukiman

Menurut Koentjaraningrat dalam Antariksa (2000) mengatakan salah satu perwujudan budaya adalah sistem kekerabatan, sistem kepercayaan dan strata sosial.

Menurut Doxiadis (1967), suatu permukiman menggambarkan variasi variasi yang berbeda dalam hal bentuk dan struktur ruang permukiman. Doxiadis menjelaskan bahwa proses terbentuknya pola permukiman didasarkan atas lima elemen ekistik sebagai karakteristik permukiman, antara lain:

#### 1. *Nature* (alam)

Permukiman yang baik adalah permukiman yang selaras dengan alam. Dalam merancang suatu permukiman diharuskan memperhatikan kondisi geografis dari permukiman tersebut. Kondisi geografis yang meliputi iklim dan topografi sangat menentukan kualitas dari perkembangan permukiman selanjutnya.

#### 2. *Man* (manusia)

Rapoport (1977) menjelaskan bahwa manusia sebagai subyek utama dalam permukiman. Manusia sebagai penghuni permukiman berperan dalam mewujudkan ruang-ruang yang membentuk pola tata rang dari suatu permukiman. Pola tata ruang permukiman yang terbentuk merupakan hasil dari sebab-akibat

yang terkait dengan perilaku/pola hidup/kebiasaan dari aktivitas manusia yang menghuni permukiman itu. Snyder (1979) mengungkapkan bahwa pola aktifitas manusia seperti pengaruh setting (rona lingkungan) baik yang bersifat fisik dan non fisik (sosial budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewadahnya (pemukiman).

### 3. *Society* (masyarakat)

Hubungan masyarakat dalam suatu lingkungan permukiman diperlukan untuk membentuk karakteristik dari kawasan permukiman tersebut. Beragam perbedaan budaya masyarakat merupakan gambaran secara umum dari pola aktivitas yang terjadi pada suatu lingkungan permukiman. Pola aktivitas yang terjadi merupakan bagian dari aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan secara komunal masyarakat dengan memanfaatkan ruang-ruang sosial sebagai wadah/sarana dalam berinteraksi. Ruang-ruang sosial yang terbentuk menimbulkan interaksi antar ruang-ruang itu sehingga membentuk suatu struktur ruang permukiman. Struktur ruang permukiman ini yang selanjutnya membentuk pola tata ruang permukiman yang juga berkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat, baik berdasarkan status keluarga maupun tingkat strata masyarakat penghuni permukiman itu.

### 4. *Shells* (permukiman)

Kondisi permukiman sangat menentukan kualitas dan karakteristik permukiman secara fisik. Karakteristik tersebut dapat mencerminkan pola permukiman dari kebudayaan lokal terdahulu dan arahan permukiman pada masa mendatang. Karakteristik yang terbentuk dari kondisi permukiman disebabkan oleh beragam aktivitas yang dilakukan oleh penghuni permukiman itu dalam suatu ruang-ruang tertentu hingga membentuk ruang-ruang yang terstruktur. Menurut Rapoport (1977), ruang-ruang yang terstruktur terbentuk melalui berbagai macam cara dengan skala yang berbeda-beda yang digambarkan melalui organisasi ruang-ruang permukiman pada tingkatan tertentu. Organisasi ruang pada berbagai tingkatan ini sangat kompleks dan menunjukkan adanya tatanan berdasarkan keberaturan tertentu. Dalam hal ini tatanan fisik lingkungan permukiman, seperti

kondisi dan tatanan bangunannya serta penggunaan ruang-ruang bersama sangat mempengaruhi terbentuknya pola tata ruang dari suatu permukiman.

#### 5. *Networks* (jaringan)

Salah satu ciri utama yang dapat merepresentasikan struktur ruang permukiman terletak pada pola jaringan jalan dan sirkulasi lingkungan suatu permukiman. Sistem sirkulasi merupakan aspek penting yang menentukan hubungan lingkungan di dalam dengan di luar permukiman. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana memberikan peran besar dalam membentuk pola sirkulasi lingkungan permukiman. Sarana sebagai ruang yang mewadahi berbagai aktivitas/kegiatan dalam interaksi antar penghuni permukiman yang dapat berupa sarana sosial, sarana ekonomi, maupun sarana budaya.

#### B. Jenis-Jenis Pola Permukiman

Menurut Kurnia dalam Jayadinata (1992), pola permukiman terdiri atas dua macam, yaitu pola permukiman memusat (permukiman memusat di permukiman jalan, permukiman memusat di sepanjang jalan, permukiman memusat bujur sangkar, permukiman belokan jalan, dan pengembangan permukiman memusat) dan pola permukiman terpencar. Menurut Scultz (1988), pola-pola permukiman dapat kita bedakan menjadi :

##### 1. Sub Kelompok Komunitas

Pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting, seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid dan sebagainya.

##### 2. *Face to face*

Pola permukiman tipe ini berbentuk linier, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman secara linier terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu tambatan perahu atau dermaga, ruang penjemuran, pasar dan sebagainya.

Menurut Rapoport (1977) karakter permukiman dapat dilihat dari organisasi ruang permukiman. Terdapat beberapa garis besar orientasi:

1. Orientasi permukiman menyusuri jalan/*along the streets*: rumah berada di sepanjang jalan dan berseberangan dengan unsur air (waterfront).

2. Orientasi kearah dalam (*inside-out city*) :Perbedaan dari orientasi ini adalah organisasi ruang memiliki fokus ke halaman dalam, dan yang membedakan dengan orientasi central space adalah domain privat dan publiknya. Khusus untuk inside-out orientation ini dapat digunakan berulang sehingga membentuk suatu *continuity of space*.

### 2.2.3. Kesimpulan teori tata ruang permukiman

Dari pengertian mengenai tata ruang dan pola permukiman dapat ditarik kesimpulan bahwa tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi dapat dikaji secara garis besar mencakup lima elemen yaitu *nature, man, society, shells, dan network*.

*Nature* (alam), mencakup elemen fisik yang membentuk dan kondisi fisik objek studi meliputi topografi, geografis, klimatologis, dan elemen fisik yang membentuk kawasan.

*Man* (manusia), sebagai subjek penelitian dengan mengetahui data diri seperti pada strata sosial, dan alur aktivitas kegiatannya. Menurut Ronels dalam Sasongko (2005), sistem kegiatan yang termasuk sistem kegiatan rutin yakni aspek kegiatan utama individu meliputi pergi belanja. ke kantor dan sebagainya dan juga kegiatan insidental ataupun tidak rutin.

*Society* (sistem sosial) yang mencakup lingkup kegiatan interaksi bersama pada permukiman tersebut mencakup organisasi masyarakat, struktur pemerintahannya secara adat maupun hukum (kepala desa, lurah, kepala adat atau pemuka agama), kegiatan masyarakat secara rutin maupun insidental dan sosial ekonomi/ mata pencaharian (struktur ekonomi). Dalam teori tata ruang termasuk sistem kegiatan berlembaga, yakni kegiatan kelembagaan baik swasta maupun pemerintahan yang difokuskan pada *particular point*; dan sistem kegiatan yang menyangkut organisasi dari pada proses-prosesnya sendiri yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks dengan berbagai sistem kegiatan lain baik dengan perorangan, lembaga/kelompok. Hubungan sosial ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem kepercayaan dan sistem kekerabatan, elemen-elemen ini yang sangat berpengaruh pada permukiman yang terbentuk oleh faktor budaya.

*Shells* (permukiman) sebagai wadah kegiatan bermukim ini akan dikaji mencakup kondisi fisik tata ruang pada permukiman ini termasuk pola, konfigurasi, orientasi dan penggunaan ruang bersama ruangnya serta aksesibilitas dan sirkulasi dalam permukiman.

*Networks* (jaringan), merupakan segala kegiatan yang mendukung berlangsungnya kehidupan di dalam permukiman yaitu sarana (fasilitas umum) ataupun prasarana (utilitas kawasan).

Tabel. 2.3 Kesimpulan Teori Elemen Pola Tata Ruang Permukiman

TINJAUAN TEORI ELEMEN POLA TATA RUANG PERMUKIMAN			
	Elemen pembentuk	Sumber	Kesimpulan
Tata ruang	1. Struktur Sosial. 2. Struktur Ekonomi, 3. Struktur Fisik	Rapoport	Dari landasan teori yang digunakan, teori Doxiadis dijadikan teori dasar dengan memasukkan teori Rapoport, Ronels dan Koentjaraningrat. Dengan demikian, teori yang digunakan untuk meninjau elemen pembentuk pola tata ruang permukiman adalah sebagai berikut : 1. <i>Nature</i> (Alam) mencakup struktur fisik
	1. Sistem kegiatan rutin 2. Sistem kegiatan berlembaga, 3. Sistem kegiatan yang menyangkut organisasi	Ronels dalam Sasongko	
Pola permukiman	1. sistem kekerabatan, 2. sistem kepercayaan 3. strata sosial.	Koentjaraningrat dalam Antariksa	2. <i>Network</i> (jaringan) mencakup jaringan jalan dan sarana pendukung 3. <i>Society</i> (Kegiatan sosial) mencakup system kepercayaan, dan system kekerabatan, kegiatan berlembaga, kegiatan menyangkut organisasi, struktur ekonomi 4. <i>Man</i> (Manusia) mencakup system kegiatan rutin, strata social, 5. <i>Shell</i> mencakup struktur dan tatanan ruang
	Elemen ekistik : 1. <i>man</i> 2. <i>nature</i> 3. <i>society</i> 4. <i>network</i> 5. <i>shell</i>	Doxiadis	

## 2.3. Tinjauan Teori Penataan Ruang pada Kawasan Pesisir sebagai Kampung Wisata Budaya

### 2.3.1. Definisi dan pengertian

#### A. Penataan ruang

Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (UU No. 27/2007).

#### B. Kawasan Pesisir

Menurut Prasita (1996), Kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik karena kawasan tersebut terdiri dari komponen daratan dan lautan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dijelaskan bahwa Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

#### C. Kawasan Wisata

Menurut Suwantoro dalam Pramono (2010) pengertian pariwisata berkaitan erat dengan perjalanan wisata, yaitu suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Sedangkan menurut UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Dalam istilah-istilah di bidang perencanaan dan perancangan kota di Indonesia (UU tentang Kepariwisata No.10 Tahun 2009), jenis obyek wisata hanya terbagi menjadi tiga (intisari dari gabungan kedua klasifikasi di atas), antara lain : obyek dan daya tarik wisata alam, obyek dan daya tarik minat khusus, obyek dan daya tarik wisata budaya.

#### D. Kampung Wisata Budaya

Perjalanan wisata dengan tujuan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah (untuk mempelajari adatistiadat, budaya, tata cara, kehidupan masyarakat dan kebiasaan yang terdapat di daerah atau negara yang dikunjungi). Sering perjalanan wisata semacam ini dengan kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri di tempat yang dikunjunginya.

### 2.3.2. Dasar peraturan dan aspek penataan ruang

#### A. Dasar peraturan

Implementasi proses-proses penataan ruang tersebut di atas diselenggarakan berdasarkan fungsi utama kawasan, aspek administratif, dan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam UU 27/2007:

1. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.
2. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota.
3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan meliputi penataan ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu.

Untuk itu dasar peraturan di bedakan antara kawasan pariwisata dan permukiman sebagai dua unsur yang berperan.

#### 1. Kriteria Ruang Kawasan Pariwisata :

- a. Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan dan perkebunan;
- b. Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional, dan internasional (pelabuhan laut, terminal kargo, angkutan sungai, bandar udara, jalan raya, kereta api);
- c. Didukung oleh ketersediaan tenaga kerja;
- d. Jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi tinggi (industri, tambang, T PA, pasar ternak/ikan);

- e. Didukung oleh prasarana dan sarana penunjang serta pelengkapannya (pasar/kios hasil kerajinan, akomodasi, energi listrik, telepon, air bersih, persampahan, sanitasi jaringan jalan);
- f. Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan kawasan industri kecil/handycraft, pusat budaya masyarakat/kesenian, bangunan pertunjukan.

## 2. Kawasan Permukiman

Kriteria ruang kawasan permukiman pedesaan :

- a. Memiliki kawasan perumahan dengan kepadatan bangunan rendah sampai sedang, tipe rumah relatif homogen, kavling besar sampai sedang;
- b. Memiliki aksesibilitas cukup baik (sekunder dan lokal), dengan sistem pelayanan angkutan jalan raya, dan angkutan sungai/danau/laut;
- c. Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan prasarana dan sarana penunjang seperti puskesmas, sekolah, perdagangan tradisional, terminal, tambatan perahu/perahu motor, Balai Desa, industri penggilingan padi, kios/depot/koperasi/BPR, pasar pelelangan hasil bumi, industri es, tempat pengeringan, perbengkelan, jaringan utilitas, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang diatur menurut jumlah penduduk dan perkembangan wilayahnya;
- d. Antar kawasan dihubungkan oleh aksesibilitas yang baik (jalan desa/lingkungan/setapak, angkutan pedesaan);
- e. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya air;
- f. Berada di luar kawasan yang berfungsi lindung.

### B. Aspek-aspek yang terkait

Menurut Salikin dalam Baun (2008) bahwa sistem pemanfaatan lahan yang berkelanjutan merupakan upaya ajakan moral untuk melestarikan lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan 3 aspek sebagai berikut :

#### 1. Kesadaran lingkungan

Sistem pemanfaatan lahan tidak boleh menyimpang dari peruntukan lahan dan ekologi lingkungan yang ada. Keseimbangan adalah indikator adanya

harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam.

## 2. Bernilai Ekonomis

Sistem pemanfaatan lahan harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik dari diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta organisme dalam sistem ekologi maupun di luar sistem ekologi. Motif ekonomi saja tidak cukup menjadi alasan pembenar (justifikasi) untuk mengeksploitasi sumber daya lahan secara tidak bertanggungjawab. Namun, dalam jangka panjang dampak ekonomis dan ekologi yang ditimbulkan sangat merugikan, terutama bagi generasi yang akan datang.

## 3. Berwatak Sosial

Sistem pemanfaatan lahan pesisir harus selaras dengan norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh peternakkan itik di pekarangan rumah secara ekonomis menjanjikan keuntungan yang layak, namun ditinjau dari aspek sosial dapat memberikan dampak yang kurang baik, seperti pencemaran udara: bau/kotoran/ pencemaran lingkungan karena penggunaan obat-obatan pembersih kandang.

Beberapa aspek yang terkait dalam penataan kawasan tepi air adalah : 1) Citra (*image*), 2) Keteraturan, 3) Bangunan, 4) Keselamatan (*safety*), 5) Keamanan (*security*), 6) Pedestrian Way. Menurut Soekadijo, 1997 : Pariwisata sebagai suatu kegiatan yang dilakukan wisatawan, dimana ditunjang dengan menyediakan sarana prasarana angkutan dalam melakukan mobilitas spasial yang merupakan *system linkage*. Gunn, 1994 mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu : 1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya, 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, 3) Menjamin kepuasan pengunjung, 4) Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangan.

Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria ideal aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek non fisik meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya (Silas dalam Ismariandy, 2010).

### **2.3.3. Strategi dan kebijakan penataan ruang di wilayah laut dan pesisir**

#### **A. Kebijakan menurut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003)**

Disampaikan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada seminar tahun 2003, beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut:

1. Integrasi matra darat, laut, dan udara serta integrasi lintas yurisdiksi dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi ini akan secara signifikan mengurangi faktor-faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir.
2. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.
3. Peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan jaringan prasarana wilayah yang memadai akan menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Adanya peran yang seimbang dari seluruh stakeholders, termasuk dalam proses pengendalian, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah laut dan pesisir. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan konflik kewenangan.

5. Pengembangan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) yang fokus terhadap pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Sejauh ini NSPM penataan ruang yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di wilayah laut dan pesisir masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Perlu disadari bahwa adanya NSPM ini akan mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah laut dan pesisir, sehingga penyusunannya perlu diprioritaskan.

#### B. Peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir

Peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah (seperti pada permukiman nelayan), diantaranya melalui pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
2. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman, khususnya untuk kawasan perkotaan pesisir, melalui: (a) peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk mewujudkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); (b) pengembangan desa pusat pertumbuhan dan prasarana dan sarana antara desa-kota untuk mendukung pengembangan agribisnis dan agropolitan (termasuk sentra-sentra produksi kelautan); (c) mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan kota (arteri dan kolektor primer) bagi kota-kota metro, besar, dan ibukota propinsi.

Dalam perencanaan regional kawasan wisata pesisir harus selaras dengan tata ruang yang telah dibuat pada tingkat regional kawasan tersebut. Penataan ruang pesisir akan mencakup penetapan peruntukan lahan yang terbagi menjadi tiga, yaitu : 1) zona preservasi, 2) zona konservasi, 3) zona pemanfaatan.

#### C. Pola pengendalian lahan pantai

Berdasarkan kecenderungan dan kemungkinan perkembangan fungsi pantai dan daerah sekitarnya, secara konseptual usaha pengembangan dan pola pengendalian lahan pantai dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pengembangan daerah pantai secara mengelompok (clustered).

Dalam hal ini pengembangan daerah pesisir diarahkan ke pedalaman. Dengan konsepsi ini diharapkan permasalahan yang mungkin dapat ditimbulkan oleh penggunaan lahan pantai secara ekstensif sepanjang pesisir dapat dibatasi. Demikian juga akibat yang mungkin dapat ditimbulkan sehubungan dengan gangguan terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat dibatasi dan dialokasikan kearah tertentu yang memungkinkan pengontrolan yang lebih efektif (Mulyadi dalam Baun, 2008).

2. Pengembangan secara reklamasi, yaitu pengembangan kawasan pantai yang ditujukan untuk mendapatkan lahan pengembangan baru melalui pengurukan atau pengeringan. Strategi ini dipilih antara lain karena semakin langkanya ketersediaan lahan perkotaan untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan fungsi perkotaan seperti transportasi, drainase, permukiman, fasilitas umum dan lain-lain. (Suprijanto dalam Baun 2008)

3. Pengembangan secara revitalisasi, yaitu pengembangan kawasan pantai melalui cara pemugaran, konservasi (pelestarian) lingkungan maupun penataan lingkungan. Pemilihan strategi ini didasarkan pada kondisi kawasan dimana terdapat area yang kumuh (slum area atau pada kawasan yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi, sosial atau budaya (Suprijanto dalam Baun 2008).

#### D. Pola pengendalian kawasan pesisir

Sehubungan dengan usaha pemanfaatan dan penggunaan lahan pesisir tersebut, usaha pengaturan dan pengendalian perlu pula dilandasi oleh peraturan-peraturan serta pola pengendalian yang baik. Untuk ini, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada serta kepentingan pemanfaatan dan pengembangan daerah pesisir, secara konseptual cara pengendalian pengembangan kawasan pesisir dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Pola pengendalian sektoral, yaitu suatu pola penguasaan atau pengendalian yang berbentuk sektoral yang memusat di suatu daerah hulu sungai dan melebar sepanjang daerah aliran sungai sampai ke daerah pantai. Pola pengendalian dan penguasaan ini sangat penting dalam rangka penataan pengembangan suatu daerah aliran sungai yang potensial.

2. Pola pengendalian kawasan pesisir yang telah berkembang secara intensif maupun ekstensif, cara yang dapat dipertimbangkan adalah dengan usaha normalisasi pola penggunaan lahan dan rezoning. Normalisasi pola penggunaan lahan di kawasan pesisir adalah menertibkan kembali cara-cara penggunaan lahan di kawasan pesisir yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup kawasan pesisir. Sementara itu, rezoning adalah mengatur kembali pola tata guna tanah yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah pantai sedemikian rupa sehingga permasalahan pengembangan pantai dapat dikendalikan dan diarahkan pada tujuan-tujuan pembangunan daerah pantai yang lebih baik. Dalam hubungan ini pengadaan peraturan bangunan dan garis sempadan pembangunan kawasan pesisir adalah penting sekali. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa usaha-usaha pembangunan baru di kawasan pesisir hanya diperbolehkan di bagian yang mengarah ke daerah pedalaman. Dengan demikian, Pengembangan yang memanjang pesisir dapat dikendalikan. (Suprijanto dalam Baun 2008)

#### E. Konsep Tribina

Tribina merupakan program nasional yang dicetuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan/perbaikan lingkungan kampung, baik lingkungan fisik maupun nonfisik. Menurut Kuswartojo dalam Kurnianda (2009), Tribina adalah pemaduan pembinaan lingkungan fisik dengan pembinaan sosial, pembinaan usaha yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan kampung. Perbaikan kampung tidak hanya dapat ditujukan pada perbaikan prasarana dan fasilitas yang bersifat fisik semata, tetapi juga mencakup perbaikan kondisi sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kampung.

Konsep Tribina, dapat dijelaskan terdiri dari Bina Lingkungan Fisik, Bina Ekonomi dan Usaha, dan Bina Sosial. Bina Lingkungan Fisik terdiri dari pengadaan atau perbaikan prasarana dan utilitas lingkungan, yang berupa pembangunan jaringan jalan, drainase, sanitasi, pengadaan air bersih dan fasilitas pengelolaan sampah serta sarana pencegah banjir. Pembangunan fasilitas tersebut juga ditujukan untuk menghubungkan sistem pelayanan kota dengan permukiman,

sehingga penduduk dapat memenuhi kepentingan kehidupannya dengan nyaman. Perbaikan fisik ini harus searah dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Kuswanto dalam Kurnianda (2009) menjelaskan bahwa meningkatnya kemampuan masyarakat menyebabkan kualitas rumahnya juga meningkat, tetapi dilain pihak terjadi fragmentasi pemilikan, petak tanah dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Semua kejadian itu menyebabkan peningkatan kepadatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan kampung.

Bina Ekonomi dan Usaha, merupakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha-usaha ekonomi. Menurut Kuswanto dalam Kurnianda (2009), pembinaan ini berupa peningkatan teknik dan manajerial, penyediaan fasilitas pembiayaan mikro dan ditekankan pada pihak produsen. Pelatihan, pendampingan, pembimbingan, bantuan modal investasi maupun modal kerja, pembentukan organisasi, penyuluhan teknik produksi, pembukaan akses informasi maupun sumber pembiayaan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan bina ekonomi dan usaha di kampung.

Sedangkan Bina Sosial merupakan upaya membangun solidaritas sosial dalam rangka menjaga dan mengembangkan lingkungan permukiman. Konsep Tribina bertujuan untuk meningkatkan kapasitas finansial dan kapasitas teknis dengan mengembangkan prasarana permukiman dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat permukiman. Konsep Tribina merupakan konsep yang dapat dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan ketiga cabang kegiatan yang tercakup di dalamnya. Sebagai contoh, dengan meningkatkan prasarana permukiman,

Tabel 2.4. Kesimpulan Teori Penataan

		TEORI	SUMBER	GABUNGAN TEORI TERPILIH
DEFENISI	Penataan ruang	Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (UU No. 27/2007).	(UU No. 27/2007).	Penataan ruang permukiman pada kawasan pesisir sebagai kampung wisata budaya merupakan proses perencanaan tata ruang pada wilayah pesisir yang telah ditunjuk dengan arahan sebagai tempat perjalanan dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi dan pembelajaran dari budaya setempat dengan mengambil bagian dalam budaya tersebut.
	Kawasan pesisir	Kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik karena kawasan tersebut terdiri dari komponen daratan dan lautan  wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya.	Prasita (1996),  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007	
	Kawasan Wisata	suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.	Suwantoro (1997),  UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan	
	Kampung Budaya	Bertujuan untuk mempelajari adat istiadat, budaya, tata cara, kehidupan masyarakat dan kebiasaan yang terdapat di daerah atau negara yang dikunjungi dengan kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri di tempat yang dikunjunginya.	Yoeti, Oka.A	

<p>KEBIJAKAN-KEBIJAKAN</p>	<p>Kriteria ruang kawasan pariwisata yaitu memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi, memiliki akses terhadap pasar, didukung oleh ketersediaan tenaga kerja, jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi tinggi, didukung oleh prasarana dan sarana penunjang serta pelengkapannya, mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan kawasan industri kecil/handycraft, pusat budaya masyarakat/kesenian, bangunan pertunjukan</p> <p>Kriteria ruang kawasan permukiman pedesaan : kepadatan bangunan rendah sampai sedang, tipe rumah relatif homogen, kavling besar sampai sedang, memiliki aksesibilitas cukup baik, mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan prasarana dan sarana, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya air, berada di luar kawasan yang berfungsi lindung</p>	<p>UU 27/2007:</p>	<p>Kriteria ruang kawasan pariwisata yaitu memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi, memiliki akses terhadap pasar, didukung oleh ketersediaan tenaga kerja, jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi tinggi, didukung oleh prasarana dan sarana penunjang serta pelengkapannya, mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan kawasan industri kecil/handycraft, pusat budaya masyarakat/kesenian, bangunan pertunjukan</p> <p>Kriteria ruang kawasan permukiman pedesaan : kepadatan bangunan rendah sampai sedang, tipe rumah relatif homogen, kavling besar sampai sedang, memiliki aksesibilitas cukup baik, mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan prasarana dan sarana, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya air, berada di luar kawasan yang berfungsi lindung</p>
<p>ASPEK TERKAIT</p>	<p>Aspek sistem pemanfaatan lahan yaitu kesadaran lingkungan, bernilai ekonomis dan berwatak sosial.</p> <p>Aspek penataan kawasan tepi air yaitu citra, keteraturan, bangunan, keselamatan, keamanan, pedestrian way.</p> <p>menyediakan sarana prasarana angkutan dalam melakukan mobilitas spasial</p> <p>Empat aspek yaitu mempertahankan kelestarian lingkungannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, menjamin kepuasan pengunjung, meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangan.</p>	<p>Salikin (2003: 6)</p> <p>Soekadijo, 1997</p> <p>Gunn, 1994</p>	<p>Aspek yang harus diperhatikan adalah lingkungan alam dan binaan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan, aspek sarana dan infrastruktur, aspek politik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut , sosial dan budaya</p>

	<p>Aspek fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek non fisik meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya</p>	<p>(Silas, 1985).</p>	
<p><b>STRATEGI PENATAAN RUANG</b></p>	<p>kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <p>a. Integrasi matra darat, laut b. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat c. Peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah d. Peningkatan peran masyarakat e. Pengembangan (NSPM)</p> <p>Peningkatan kualitas lingkungan pesisir dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman</li> <li>2. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman</li> </ol> <p>Cara pengendalian pengembangan kawasan pantai yaitu dengan pola pengendalian sektoral dan pola pengendalian dengan normalisasi pola penggunaan lahan dan rezoning.</p> <p>Konsep Tribina sebagai strategi penataan permukiman dengan bina lingkungan fisik, bina ekonomi usaha dan bina sosial.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum (PU)</p>	<p>Strategi dapat dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bina lingkungan fisik dengan peningkatan kualitas fisik kawasan penelitian</li> <li>2. bina ekonomi dan usaha berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat</li> <li>3. bina sosial dengan peningkatan peran masyarakat</li> </ol>

## 2.4 Tinjauan Penelitian Sejenis

### 2.4.1. Pola Tata Ruang Permukiman Bantaran Sungai Jagir di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianda (2010) ini, dilatarbelakangi oleh fenomena urbanisasi yang tidak terkontrol sehingga berakibat pada masyarakat golongan ekonomi kelas bawah yang tidak memiliki ketrampilan/keahlian khusus dalam bekerja, memaksakan diri bertempat tinggal di kota dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Seperti halnya di Surabaya, masyarakat ini membentuk permukiman illegal di bantaran sungai Jagir sebagai wilayah mereka berhuni. Fenomena yang terjadi pada permukiman bantaran sungai Jagir memerlukan pengamatan secara terstruktur terkait pola permukiman dan factor pendukung terbentuknya permukiman bantaran sungai Jagir di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Suatu permukiman ilegal dengan kondisi bangunan yang tidak layak difungsikan sebagai hunian, tetapi memiliki peran besar dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan dan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung dari kualitas kebiasaan/pola hidup masyarakat dari suatu permukiman. Kualitas kebiasaan/pola hidup masyarakat mampu membentuk karakteristik pada suatu permukiman, karena karakteristik tersebut dapat merepresentasikan kondisi permukiman secara umum terkait dengan kualitas huniannya serta mencerminkan latar belakang sosial budaya dan sosial ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan arahan berupa konsep dan strategi penataan secara terstruktur terhadap permukiman bantaran sungai Jagir di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan karakteristik permukimannya dengan mengetahui terlebih dahulu pola tata ruang dan factor yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman bantaran sungai Jagir.

Penelitian ini bersandar pada teori dari Rapoport dan Doxiadis sebagai dasar. Rapoport (1977:276) menjelaskan bahwa tatanan permukiman bergantung pada berbagai aturan, norma, dan perilaku masyarakat setempat yang dapat diartikan sebagai faktor sosio-kultural. Faktor sosio (sosial) mewakili kehidupan social kemasyarakatan, sedangkan faktor kultural (budaya) menggambarkan pola kebiasaan dari masyarakat setempat. Faktor social dan budaya juga dipengaruhi

oleh adanya faktor-faktor berupa kegiatan yang bersifat ekonomi. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan pola tata ruang permukiman serta mencerminkan karakter dan pola aktivitas yang terbentuk dalam struktur ruang suatu permukiman. Gagasan pola aktivitas yang terbentuk dari perilaku masyarakat merupakan inti dari sebuah kebudayaan yang menjadi aspek utama dalam proses terjadinya lingkungan suatu hunian dan rumah sebagai wadah untuk melangsungkan kehidupan yang berkelanjutan.

Doxiadis (1967) menjelaskan bahwa suatu permukiman terdiri atas *the content* (isi) yaitu manusia dan *the container* (tempat fisik manusia tinggal yang meliputi elemen alam dan buatan manusia), sehingga permukiman adalah tempat (ruang) untuk hidup dan berkehidupan bagi kelompok manusia. Sedangkan proses terbentuknya pola permukiman didasarkan atas lima elemen ekistik sebagai karakteristik permukiman yang meliputi *nature, man, society, shell, dan networks*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan model penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study & field study*). Penelitian ini dilakukan melalui observasi di lapangan dan wawancara terstruktur dengan penghuni permukiman yang termasuk dalam sampel penelitian. Wawancara terstruktur diperoleh melalui kuisioner untuk mendapatkan data-data tentang perkembangan pola permukiman, pola sirkulasi, pola aktivitas masyarakat, dan ketersediaan sarana-prasarana di lingkungan permukiman. Pendekatan yang digunakan adalah membuat pemetaan penghuni permukiman (*users activity mapping*) dan kondisi aksesibilitas di lingkungan kawasan penelitian, sehingga akan diperoleh gambaran tentang struktur dan pola tata ruang permukiman dan factor terbentuknya pola tata ruang permukiman bantaran sungai Jagir di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Analisis pembahasan dilakukan merujuk pada pemahaman Doxiadis yang menjelaskan bahwa suatu permukiman terdiri atas *the content* dan *the container*. *The content* (isi) merupakan seperangkat pikiran dan perilaku manusia yang bertindak sebagai subjek yang memanfaatkan ruang-ruang yang ada dalam hubungan kepentingan kehidupannya. Dalam hal ini, aktivitas manusia menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya lingkungan suatu hunian serta berperan penting menentukan kebutuhan ruang-ruang yang tersedia. *The content* (isi)

sebagai aspek nonfisik dapat dibagi menjadi dua faktor penting sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam elemen ekistics, yaitu *man* (aktivitas manusia yang dipengaruhi aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya) dan *society* (kehidupan bersosialisasi/berinteraksi dalam sebuah ruang sosial yang dipengaruhi oleh aspek sosial-ekonomi dan sosial-budaya). *The container* memiliki pengertian sebagai ruang yang tidak lebih dari sekedar ruang fisik secara tiga dimensional karena pada waktu dan konteks yang berbeda akan menghasilkan jenis ruang-ruang yang berbeda yang terkait dengan sistem budaya dan lingkungannya. Dalam proses pembentukan pola tata ruang permukiman bantaran sungai Jagir, elemen-elemen ekistics permukiman dipengaruhi oleh beberapa aspek fisik yang meliputi elemen *nature* (lingkungan fisik alam), *shell* (lingkungan binaan), dan *networks* (sarana dan prasarana).

Untuk arahan penataan dilakukan melalui pendekatan kebijakan pemerintah dan konsep tribina. Arahan penataan melalui pendekatan kebijakan pemerintah meliputi peremajaan permukiman dengan relokasi penduduk permukiman bantaran sungai Jagir ke rumah susun sederhana dan penataan permukiman secara terpadu dengan revitalisasi kawasan permukiman bantaran sungai Jagir menjadi pusat pembinaan terpadu, area usaha rumah tangga, taman kota dan wisata air. Sedangkan arahan penataan melalui pendekatan tribina, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas permukiman melalui renovasi dan penataan bangunan serta penambahan sarana-prasarana lingkungan.

#### **2.4.2. Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar**

Berdasarkan penelitian yang diambil dari *architecture e- jurnal volume 8* oleh Issana Meria Burhan (2008) ini, berangkat dari latarbelakang kebudayaan Aceh yang telah lama memiliki konsep-konsep dasar mengenai pengaturan tata ruang rumah dan lingkungannya yang sarat akan nilai budaya lokal. Namun, rangkaian kejadian yang terjadi di Aceh secara menyeluruh menyebabkan berkurangnya keberadaan permukiman tradisional, sehingga warisan budaya bangsa Aceh dikhawatirkan tidak dapat bertahan. Masyarakat Aceh sendiri pun

mulai mengalami pendangkalan pemahaman terhadap konsep-konsep lokal dalam permukiman tradisional berbasis adat. Sementara itu, terutama setelah bencana tsunami, pembangunan permukiman baru diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya dinilai secara ekonomis, tetapi juga memperhatikan faktor kultur budaya setempat. Instansi yang terkait dengan program pembangunan permukiman, perlu memahami konsep bermukim pada masyarakat Aceh.

Salah satu permukiman tradisional yang masih bertahan adalah *Gampong* Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat *Gampong* Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian mengidentifikasi pola tata ruang permukiman *Gampong* Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar, dan menganalisis pola tata ruang permukiman tradisional *Gampong* Lubuk Sukon yang terbentuk akibat pengaruh sistem sosial budaya masyarakatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluative dengan metode pengambilan data melalui observasi, kuisioner, dan wawancara. Pengambilan sampel dihitung dengan rumus Slovin, menggunakan teknik pengambilan proporsional untuk mendapatkan sampel yang merata di seluruh wilayah studi. Dari 191 unit bangunan, diambil 66 sampel bangunan. Sampel masyarakat didapatkan dari perhitungan yang sama, karena sampel masyarakat merupakan pemilik bangunan.

Metode analisis data yang digunakan mencakup dalam dua tahapan yaitu tahapan pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat *Gampong* Lubuk Sukon dan tahapan kedua ialah mengidentifikasi pola tata ruang permukiman *Gampong* Lubuk Sukon dan menganalisis kesesuaiannya dengan konsep pola tata ruang tradisional Aceh. Pada tahapan pertama, karakteristik diidentifikasi melalui :

1. Tinjauan sejarah dan perkembangan *Gampong* dan budaya bermukim masyarakat Aceh, yang meliputi sejarah munculnya *Gampong* dan perkembangannya dari masa kerajaan, kolonial, kemerdekaan dan reformasi.
2. Analisis sosial budaya (Koentjaraningrat, 1982) sistem kelembagaan; sistem kemasyarakatan/kekerabatan; kehidupan ekonomi; dan kehidupan budaya dan

religi Hasil interpretasi sejarah dan pengaruhnya terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat *Gampong* Lubuk Sukon, dijadikan dasar untuk mendukung kajian untuk analisis karakteristik pola tata ruang permukiman tradisional.

Pada tahapan ke dua, analisis yang dilakukan ialah :

1. Analisis tata guna lahan dilakukan untuk melihat elemen apa saja yang membentuk ruang permukiman, pengaruhnya terhadap pemanfaatan guna lahan, dan peletakan elemen berdasarkan konsep yang dikenal dalam pola tata ruang tradisional Aceh. Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap perkembangan elemen-elemen pembentuk kawasan pedesaan (Oswald & Baccini, 2000), dengan menggunakan analisis *before-after*. *Before* mewakili masa awal terbentuknya *Gampong* Lubuk Sukon (1920-1950), masa perkembangan infrastruktur permukiman di *Gampong* Lubuk Sukon (1950-1989), dan *after* mewakili kondisi eksisting saat ini (1989-2006). Selanjutnya, untuk melihat keterkaitan antar elemen-elemen pembentuk kawasan pedesaan, dilakukan analisis dengan teknik *super impose*.

2. Analisis ruang budaya dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan hirarki ruang dan sifat penggunaan ruang yang ada di *Gampong* Lubuk Sukon. Pendekatan yang dilakukan adalah secara eksploratif, dengan melihat fungsi dan kepentingan ruang permukiman dari hasil analisis kehidupan budaya dan religi dan kegiatan masyarakat sehari-hari.

3. Analisis pola tata ruang tempat tinggal. Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tiga variabel, yaitu di antaranya: fisik bangunan dan pekarangan; struktur tata ruang tempat tinggal; dan pola tata bangunan.

Hasil analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pada studi ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik sosial budaya

Karakteristik sosial budaya masyarakat *Gampong* Lubuk Sukon ditinjau dari unsur-unsur kebudayaan, berpengaruh pada bentukan pola tata ruang permukiman tradisional. Pada kelembagaan pemerintahan terdapat struktur atau hierarki yang berlaku, dimulai dari kepemimpinan *imeum mukim* pada tingkatan

*Mukim, keuchik* pada tingkatan *Gampong*, hingga *Kasun* pada tingkatan *Dusun* (*Darul*). Masing-masing kepemimpinan dibagi berdasarkan hierarki ruang dari makro hingga ke mikro. Selain itu, terdapat struktur kepemimpinan yang sesuai dengan pembagian pemanfaatan ruang. *Keuchik* sebagai kepala permukiman, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat *Gampong*, sedangkan untuk pemanfaatan kawasan pertanian ditangani oleh *keujruen blang*. Aktivitas kelembagaan di *Gampong Lubuk Sukon* menciptakan fungsi pada ruang-ruang yang digunakan, yang memperlihatkan sifat dan hierarkinya dalam ruang permukiman. Pola tata ruang yang khas, terbentuk oleh sistem waris *peunulang* dan adat menetap nikah *matrilokal*, juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan di *Gampong Lubuk Sukon*.

## 2. Pola tata ruang permukiman tradisional *Gampong Lubuk Sukon*

Pola tata ruang permukiman di *Gampong Lubuk Sukon* sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya masyarakatnya yang beragama Islam. Struktur ruang yang terbentuk memenuhi pola radial, dengan orientasi *meunasah*. Adapun elemen-elemen lainnya yang membentuk struktur ruang di *Gampong Lubuk Sukon* adalah perumahan dengan keluarga muslim sebagai penghuninya, fasilitas pelayanan seperti sarana pendidikan, perkantoran, perdagangan, dan sebagainya, dan lahan usaha untuk agraris atau pengelolaan alam lainnya. Sistem pengaturan ruang secara makro adalah pembagian ruang berdasarkan fungsi guna lahan yang terbentuk secara alami. Kawasan permukiman memusat di tengah-tengah dilengkapi dengan *meunasah* yang terletak di wilayah *tumpok*. Fasilitas umum berada di sekitar kawasan permukiman, terletak di wilayah *ujong*. Lahan usaha, yaitu lahan pertanian, berada di luar wilayah permukiman, disebut dengan *blang*. Struktur ruang budaya di *Gampong Lubuk Sukon* menunjukkan *meunasah* sebagai pusat aktivitas. Selanjutnya adalah tempat kerabat sebagai tempat bersosialisasi antar masyarakat, dan sawah/ladang sebagai tempat bekerja.

Pada skala yang lebih mikro, pola tata ruang permukiman masyarakat *Gampong Lubuk Sukon* terbentuk berdasarkan sistem kekerabatan, yaitu rumah orangtua menjadi bangunan inti (pusat) dari kelompok hunian suatu keluarga.

Wujud kekerabatan ini terdiri dari keluarga inti senior yang tinggal berdekatan dengan keluarga inti dari anak-anak perempuannya, sesuai dengan adat menetap nikah matriloal dalam masyarakat Aceh. Dalam tataran rumah dan pekarangan, seuramoe keue (serambi depan) merupakan pusat dari bangunan rumah Aceh. Ruang lainnya yang menjadi pinggiran (periphery), adalah seuramoe teungoh (tungai) dan dapur, hanya diperbolehkan untuk perempuan. Struktur ruang pada rumah Aceh menunjukkan dualisme antara ajaran Islam yang cenderung patriarkal, dengan adat peunulang Aceh yang bersifat matriarkal.

#### **2.4.3. Kesimpulan tinjauan penelitian sejenis**

Berdasarkan tinjauan penelitian sejenis yang dianalisis yaitu penelitian mengenai pola tata ruang permukiman, dapat dibagi berdasarkan enam bagian penelitian yaitu latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan teori yang digunakan, metode penelitian, analisa yang dilakukan serta rekomendasi yang diberikan. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :



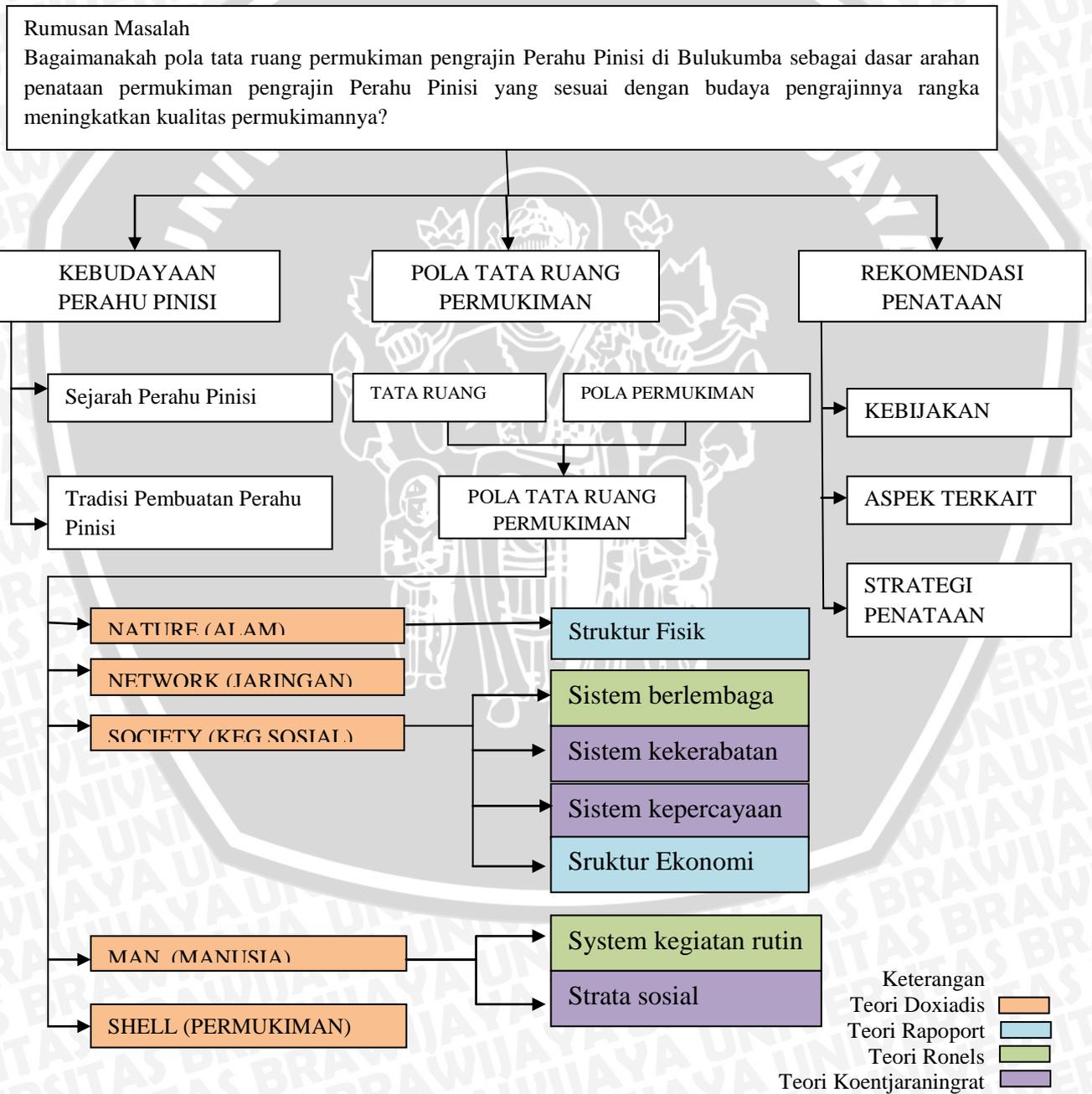
Tabel 2.5. Tinjauan Penelitian Sejenis

JUDUL PENELITIAN	Pola Tata Ruang Permukiman Bantaran Sungai Jagir di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ( Kurnianda, 2010 )	Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar (Burhan, 2008)
LATAR BELAKANG	Fenomena urbanisasi yang tidak terkontrol sehingga membentuk permukiman illegal yang berpengaruh pada kualitas permukimannya seperti pada bantaran Sungai Jagir.	konsep dasar Kebudayaan Aceh mengenai pengaturan tata ruang rumah dan lingkungannya yang sarat akan nilai budaya lokal.
TUJUAN	Merumuskan arahan berupa konsep dan strategi penataan secara terstruktur terhadap permukiman bantaran sungai Jagir di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan karakteristik permukimannya dengan mengetahui terlebih dahulu pola tata ruang dan factor yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman bantaran sungai Jagir.	Mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian mengidentifikasi pola tata ruang permukiman Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar, dan menganalisis pola tata ruang permukiman tradisional Gampong Lubuk Sukon yang terbentuk akibat pengaruh sistem sosial budaya masyarakatnya.
TEORI	Rapoport (1977:276) menjelaskan bahwa tatanan permukiman bergantung pada berbagai aturan, norma, dan perilaku masyarakat setempat yang dapat diartikan sebagai faktor sosio-kultural. Doxiadis (1967) menjelaskan bahwa suatu permukiman terdiri atas <i>the content</i> (isi) yaitu manusia dan <i>the container</i> (tempat fisik). Proses terbentuknya pola permukiman didasarkan atas lima elemen ekistik sebagai karakteristik permukiman yang meliputi nature, man, society, shell, dan networks.	Analisis sosial budaya (Koentjaraningrat, 1982) sistem kelembagaan; sistem kemasyarakatan/kekerabatan; kehidupan ekonomi; dan kehidupan budaya dan religi elemen-elemen pembentuk kawasan pedesaan (Oswald & Baccini, 2000), dengan menggunakan analisis before-after.

METODE	<p>Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui observasi di lapangan dan wawancara terstruktur dengan penghuni permukiman yang termasuk dalam sampel penelitian.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluative dengan metode pengambilan data melalui observasi, kuisioner, dan wawancara.</p>
ANALISA	<p>Analisis pembahasan dilakukan merujuk pada pemahaman Doxiadis yang menjelaskan bahwa suatu permukiman terdiri atas the content dan the container.</p> <p>Pendekatan yang digunakan adalah membuat pemetaan penghuni permukiman (users activity mapping) dan kondisi aksesibilitas di lingkungan kawasan penelitian,</p>	<p>analisis yang dilakukakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisis tata guna lahan</li> <li>2. analisis ruang budaya</li> <li>3. analisis pola tata ruang tempat tinggal</li> </ol>
REKOMENDASI	<p>Untuk arahan penataan dilakukan melalui pendekatan kebijakan pemerintah dan konsep tribina yaitu bina lingkungan sosial, bina lingkungan fisik dan bina usaha ekonomi.</p>	<p>Pelestarian</p>

## 2.5 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan berangkat dari rumusan masalah penelitian ini yaitu mengetahui pola tata ruang permukiman pengrajin pinisi untuk dijadikan dasar penataan.. Oleh karena itu, pada tinjauan teori ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu tinjauan teori mengenai kebudayaan Perahu Pinisi, pola tata ruang permukiman dan tinjauan teori mengenai rekomendasi penataan sebagai tanggapan terhadap hasil penelitian.



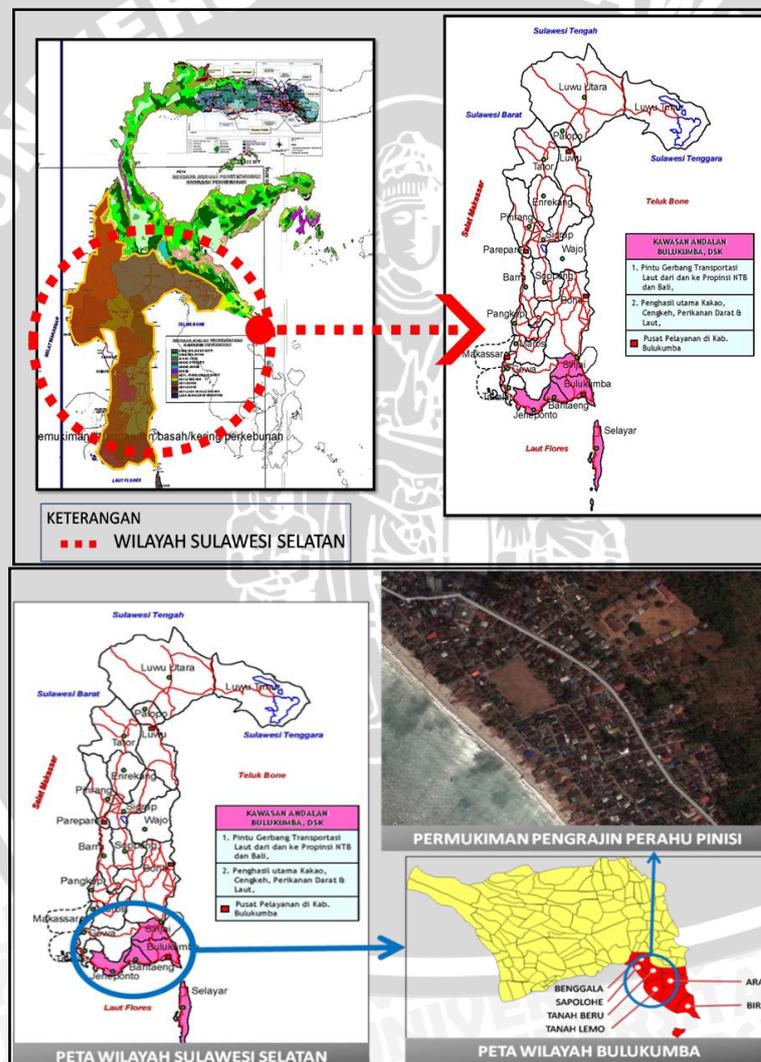
Gambar 2.3 Diagram Kerangka Teori

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

#### 3.1.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terdapat di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bonto Bahari di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wilayah studi terletak 176 km dari pusat kota Makassar (menempuh kurang lebih 4-5 jam perjalanan darat) dan 24 km dari pusat kota Bulukumba (menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan darat).



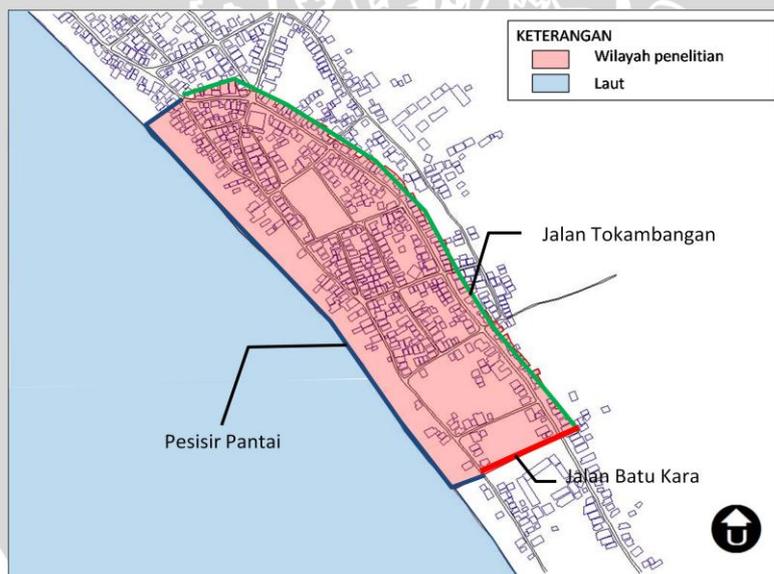
Gambar 3.1. Perbesaran wilayah Tanah Beru pada Kabupaten Bulukumba

Sumber. diolah dari [www.bappeda-sulsel.go.id](http://www.bappeda-sulsel.go.id)



Gambar 3.2. Lokasi penelitian dari peta satelit

Sumber : diolah dari Google Maps



Gambar 3.3. Lokasi Penelitian

Batasan wilayah penelitian adalah:

Utara : Jalan Tokambangan (Poros Bira)

Timur : Jalan Batu Kara

Selatan : Pesisir Pantai Tanah Beru

Barat : Pesisir Pantai Tanah Beru

### 3.1.2. Objek penelitian

Objek studi adalah permukiman pengrajin Perahu Pinisi yang bertempat di Tanah Beru. Sebagian besar merupakan Suku Bugis Makassar keturunan masyarakat Ara yang diyakini memiliki keahlian membuat Perahu Pinisi. Sebagian besar masyarakat di wilayah studi menjadikan mata pencaharian mereka sebagai pengrajin Perahu Pinisi dan juga nelayan. Wilayah penelitian ditetapkan menjadi Kawasan Industri Kapal Rakyat sejak tahun 2000 sebagai sentra pembuatan Perahu Pinisi dengan fungsi sebagai kapal nelayan, kapal kargo dan kapal wisata.

### 3.2. Jenis dan Variabel Penelitian

#### 3.2.1 Jenis dan tahapan penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan model penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study & field study*).

Tahap penelitian ini terbagi atas:

1. Tahap pendahuluan merupakan tahapan pra lapangan untuk mempersiapkan penelitian. Pada tahapan ini, dilakukan melalui dua cara yaitu studi mengenai penelitian sejenis untuk mempelajari mengenai pola tata ruang permukiman dan selanjutnya ada tahapan pendahuluan untuk menentukan lokasi penelitian dan batasan-batasan wilayah studi.
2. Tahap pengumpulan data dan pengolahan data. Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer ditempuh melalui empat cara yaitu wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan, internet penelitian sejenis dan survey institusional. Selanjutnya tahap pengolahan data, meliputi klasifikasi dan pengelompokan data berdasarkan variabel yang telah ditentukan
3. Tahap analisa data, meliputi menelaah dari berbagai sumber, mengkaji dan menganalisis data.
4. Tahap akhir merupakan pengambilan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

### 3.2.2 Variabel penelitian

Variabel dari penelitian merupakan suatu objek, atau sifat, atau atribut atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan merupakan lima elemen pembentuk pola permukiman yang berasal dari teori Doxiadis yaitu nature, networks, society, man dan shell.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

VARIABEL	SUB VARIABEL	DATA YANG DIBUTUHKAN	CARA PENGUMPULAN DATA
<i>Nature</i>	Keadaan geografis	topografi	Survey instutisional (Kecamatan Bontobahari)
		klimatologi	Survey instutisional (Kecamatan Bontobahari)
		geografis	Survey instutisional (Kecamatan Bontobahari)
		Vegetasi	Observasi langsung
<i>Networks</i>	Sirkulasi dan Aksesibilitas	Kondisi fisiknya	Observasi langsung
		Pembagian tingkat jalan	Observasi langsung
		Aksesibilitas	Observasi langsung
	Sarana Umum	Pola Sirkulasi	Observasi langsung
		Sarana Ibadah	Observasi Langsung
		Sarana Pendidikan	Observasi Langsung
<i>Society</i>	Sosial budaya	Sarana Kesehatan	Observasi Langsung
		Karakteristik masyarakat dan kebudayaan pinisi	Wawancara, observasi langsung dan literature kepustakaan
	Sosial Ekonomi	Mata pencaharian penduduk	Wawancara kuesioner dan observasi langsung
Sosial Keagamaan	Keperacayaan dan kegiatan yang dilakukan	Wawancara dan observasi langsung	
<i>Man</i>	Kependudukan	Status kependudukan dan status kepemilikan bangunan/kavling	Survey instutisional (Kelurahan Tanah Beru dan Tanah Lemo), wawancara
	Aktivitas Masyarakat	Alur kegiatan rutin dan insidentil bagi pengrajin dan non pengrajin	Wawancara, observasi langsung, kuesioner, dan literature kepustakaan
<i>Shells</i>	Bentuk Bangunan	Style bangunan, Konstruksi bangunan, material, fungsi ruang	Wawancara, kuesioner, dan literature kepustakaan
	Tatanan Permukiman	Orientasi, penggunaan ruang terbuka dan tatanan massa	Wawancara dan observasi langsung

Tabel 3.2 Variabel Arahan Penataan

VARIABEL ARAHAN PENATAAN	DATA YANG DIBUTUHKAN	SUMBER	ELEMEN TERKAIT
<b>Bina Lingkungan Fisik</b>			
1. Integrasi Matra Darat dan Laut	a. Zonasi eksisting b. Kebutuhan zona tambahan	Analisis kondisi geografis Analisis alur pergerakan pengrajin dan non pengrajin Analisis kepemilikan bangunan/ kavling Analisa tatanan permukiman	<i>Network, Man, Shell</i>
2. Peningkatan pelayanan jaringan	Jaringan jalan yang memerlukan perbaikan	Analisis kondisi fisik sirkulasi dan sarana umum	<i>Network,</i>
<b>Bina Ekonomi dan Usaha</b> pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat	Potensi ekonomi masyarakat Tanah Beru	Analisis sosial ekonomi Analisis aktifitas masyarakat Analisa status kependudukan	<i>Man, Society,</i>
<b>Bina Sosial</b> peningkatan peran masyarakat	Permasalahan sosial masyarakat Tanah Beru	Analisis karakteristik masyarakat Analisis aktivitas masyarakat	<i>Society, Man</i>

### 3.3. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi merupakan masyarakat yang terletak di Kelurahan Tanah Beru dan Kelurahan Tanah Lemo yang termasuk dalam Kawasan Industri Kapal Rakyat.

Sampel penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sampel yang merupakan pengrajin dan non pengrajin. Pada sampel pengrajin dilakukan pemilihan dengan metode *purposive sampling*, dengan cara pemilihan obyek kajian yang didasarkan atas kriteria-kriteria yang mengarah pada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui proses pembuatan perahu baik secara teknis maupun upacaranya serta mengetahui pergerakan kegiatan rutin pengrajin. Sampel pengrajin yang diambil meliputi hunian dan pelaku. Dari sebelas lkelompok pengrajin yang sedang beroperasi di wilayah penelitian, diambil dua kelompok pengrajin pada lokasi pembuatan Perahu Pinsi yang dianggap memenuhi kriteria. Kriteria pemilihannya pengrajin yaitu :

1. memproduksi perahu besar dengan ukuran panjang lebih dari 20 m dikarenakan hanya pengrajin dengan skala besar yang masih melakukan rangkaian kegiatan upacara sedangkan perahu dengan ukuran yang lebih kecil sudah tidak melakukan upacara dikarenakan alasan kurang efektif. Selain itu, produksi perahu dengan skala besar juga berpengaruh pada minat partisipasi masyarakat.
2. memiliki susunan pekerja yang masih lengkap mulai dari juragan, kepala tukang (pongawa) dan pekerja (sawi) yang masih bertempat tinggal di lokasi penelitian.

Pada sampel non pengrajin dilakukan pemilihan dengan metode *accidental/convenience sampling*. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan anggota populasi yang ditemui dan bersedia menjadi responden (sampel).

Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Slovin dengan jumlah penduduk adalah 1.527 orang (data demografi kelurahan). Perhitungan jumlah sampel adalah :

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{1.527}{1 + 1.527 (0.2)^2} \\ &= 24,5 \end{aligned}$$

Keterangan :

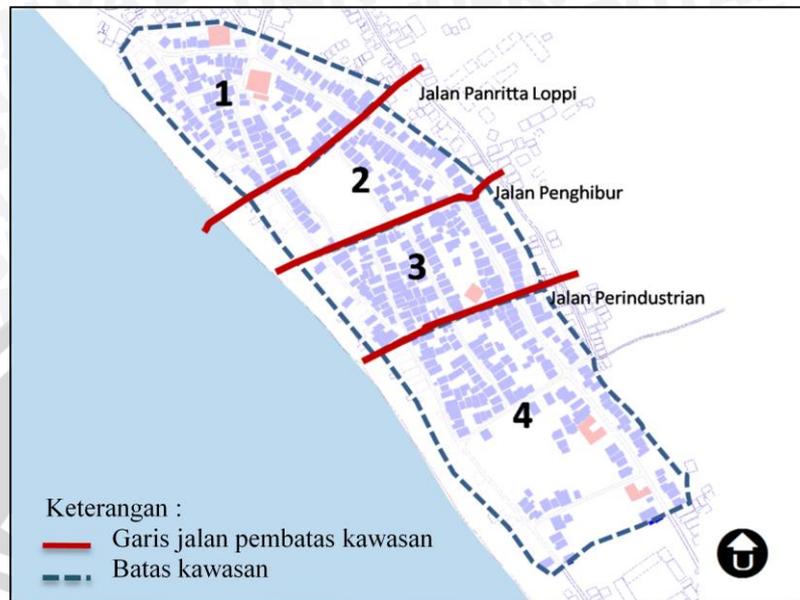
N = ukuran populasi

n = jumlah sampel

e = persentase kelonggaran ketelitian, untuk penelitian kualitatif maksimal 20 %

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui minimal jumlah sampel adalah 24 orang. Pada saat pemberian kuesioner, sampel yang ditemui berjumlah 36 orang yang terdapat di 12 hunian dengan penyebaran pada empat kawasan permukiman yang dibagi mengikuti grid jalan penghubung Jalan Pinisi-Jalan Galangan menuju Jalan Tokambangan yaitu Jalan Panritta Loppi, Jalan Penghibur, dan Jalan Perindustrian. Pembagian sampel pada tiap kawasan berdasarkan perbandingan jumlah hunian di kawasan yaitu 362 huniandengan pembagian pada kawasan satu berjumlah 27 % yaitu 102 hunian, kawasan dua 18,7 % yaitu 68 hunian, kawasan tiga 32 % yaitu 117 hunian dan kawasan empat 20 % yaitu 75 hunian. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui jumlah pembagian berdasarkan perbandingannya yaitu menjadi empat hunian pada kawasan satu, dua hunian pada kawasan dua, empat hunian pada kawasan tiga dan dua hunian pada

kawasan empat. Sampel pelaku merupakan penghuni sampel hunian dengan mengambil tiga sampel dengan status dalam keluarga sebagai bapak, ibu, dan anak.



Gambar 3.4. Pembagian Kawasan Penelitian

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

#### 3.4.1. Pengumpulan data primer

Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data langsung dari sumber utama baik masyarakat ataupun dengan pengamatan langsung di lapangan. Data-data yang dikumpulkan berupa kondisi fisik wilayah penelitian dan kegiatan bermasyarakat dalam bersosialisasi. Pada pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan empat cara yaitu wawancara, kuesioner, observasi langsung dan dokumentasi.

##### A. Wawancara

Wawancara difokuskan terhadap pimpinan dalam kegiatan bermukim dan berbudaya pada wilayah penelitian yaitu juragan perahu dan lurah. Pertama-tama, wawancara dilakukan terhadap dua lurah yaitu Lurah Tanah Beru dan Lurah Tanah Lemo.

Dari wawancara ini, data yang diperoleh yaitu :

1. kegiatan bermasyarakat dalam lingkup agama, budaya dan pemerintahan
2. nama juragan yang mengerjakan Perahu Pinisi dengan skala besar di wilayahnya masing-masing yaitu Juragan A di wilayah Tanah Beru dan Juragan B di wilayah Tanah Lemo.

Kedua wawancara dilakukan dengan juragan sebagai pimpinan tertinggi dalam proses pembuatan Perahu Pinisi.

Dari kedua juragan ini data yang diharapkan didapatkan adalah :

1. Proses pembuatan Perahu Pinisi
2. Penggunaan ruang pada proses pembuatan Perahu Pinisi
3. Pelaksanaan upacara (pihak-pihak yang terlibat, tata cara dan penggunaan ruangnya)
4. Proses pemilihan ponggawa dan tukang
5. Jumlah pekerja yang terlibat
6. Ponggawa dan tukang yang bertempat tinggal di lokasi penelitian

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada ponggawa dan tukang untuk mendapatkan data mengenai alur aktivitasnya baik secara rutin maupun insidental.

#### B. Kuesioner

Kuesioner yang dibagikan diberikan kepada masyarakat non pengrajin sejumlah 36 orang di 12 hunian yang tersebar pada empat kawasan lokasi. Setiap hunian mengisi 3 kuesioner dengan peranan dalam rumah sebagai ayah, ibu dan anak dengan batasan usia lebih dari 12 tahun (asumsi usia anak mengikuti kegiatan kebudayaan). Dari kuesioner diharapkan diperoleh data mengenai :

1. identitas responden
2. alur kegiatan rutin yang dibedakan berdasarkan periode waktu satu hari (pagi, siang, sore dan malam) dan seminggu (hari kerja dan hari libur).
3. Alur kegiatan insidental sehubungan dengan kegiatan agama, budaya dan pemerintahan.
4. Prosesi upacara adat pembuatan Perahu Pinisi yang diikuti dan tempatnya.

### C. Observasi Langsung

Metode observasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu observasi pengamatan fisik dan perilaku :

1. observasi permukiman dilakukan dengan melihat keadaan fisik wilayah penelitian.
2. observasi perilaku (*behaviour*) untuk melihat pergerakan (*movement*) dari manusia sebagai pelaku kebudayaan yang hadir melalui ritual-ritual adat sehubungan dengan proses pembuatan Perahu Pinisi ataupun kegiatan sehari-hari dari masyarakat di lokasi penelitian.

### D. Dokumentasi

Dokumentasi akan hadir dalam bentuk video, foto maupun sketsa untuk mendeskripsikan keadaan wilayah studi sekaligus sebagai gambaran yang mampu menyampaikan suasana pada lokasi penelitian.

#### 3.4.2. Pengumpulan data sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui survey literatur (bersumber dari media internet dan kepustakaan), penelitian tinjauan sejenis dan survei institusional. Survey literatur yang diperoleh dari media internet berupa peraturan penataan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba dan kebudayaan pinisi di Bulukumba sedangkan survey kepustakaan meliputi teori mengenai pola tata ruang permukiman. Tinjauan penelitian sejenis yang dilakukan mengambil penelitian dengan tujuan penelitian yang mendekati tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pola tata ruang permukiman. Survei institusional ke kantor Kelurahan Tanah Beru, Kelurahan Tanah Lemo dan Kecamatan Bontobahari yaitu data demografi, potensi, dan penggunaan lahan di wilayah penelitian.

#### 3.5. Metode Analisis Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu dilakukan dengan mengeliminasi data-data yang kurang relevan dengan permasalahan yaitu mengetahui pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di kelurahan Tanah Beru ini. Penyeleksian data didasarkan pada variabel elemen pembentuk permukiman yang terbentuk

dari penggabungan teori Doxiadis, Rapoport, Ronels dan Koentjaraningrat yaitu alam, manusia, sistem sosial, permukiman dan jaringan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Setiap variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yaitu *nature*, *networks*, *society*, *man*, dan *shell* akan dikaji menggunakan teori pola tata ruang permukiman.

Variabel yang pertama ialah *nature* (alam) yang dianalisa untuk melihat pengaruh kondisi geografis dan elemen fisik pembentuknya pada pembentukan pola tata ruang. Untuk variabel *networks* (jaringan) dianalisa struktur permukiman melalui analisa melalui kondisi fisik sirkulasi, pembagian tingkat jalan dan pola sirkulasi. Kondisi fisik yang dianalisa dalam penelitian ialah material, lebar jalan dan pengguna yang melalui jalan tersebut. Selain itu pada analisa jaringan juga dilihat penggunaan sarana yang berada di wilayah penelitian. Variabel *society* (sistem sosial) dianalisa dengan melihat kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan masyarakat dalam menyelenggarakan proses bermukim dan berbudaya. Dalam hal ini aspek yang dilihat adalah sosial budaya, sosial ekonomi dan keagamaan. Untuk variabel *man* dianalisa pergerakan masyarakat melalui metode behaviour mapping dimana dilakukan pemetaan penggunaan ruang menggunakan metode mapping dot mengikuti periodik waktu untuk membandingkan penggunaan ruang pada hari kerja dan libur serta pengelompokkan waktu satu hari yaitu pagi, siang, sore dan malam serta alur aktivitasnya. Dari pemetaan tersebut dapat dilihat sebab akibat pergerakan manusia terhadap pola permukimannya. Pergerakan masyarakat difokuskan pada usaha manusia memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu beribadaha, bersosialisasi dan berbudaya. Interaksi komunal pada masyarakat ini berdampak pada penggunaan ruang bersama. Analisa variabel *shell* (permukiman) dilakukan dengan menganalisis kondisi bangunan dan struktur permukiman baik tatanan, view, dan orientasi bangunan yang menyusun permukiman tersebut. Dari data tersebut didapatkan pola tata ruangnya. Setelah melalui tahapan analisis dari kelima elemen tersebut kemudian disimpulkan satu pola tata ruang permukiman secara keseluruhan pada wilayah penelitian yang dilakukan melalui *overlay* hasil dari tiap elemen pembentuknya.

Rekomendasi penataan diberikan untuk menanggapi permasalahan utama di kawasan penelitian yang ditemukan selama proses analisis yaitu memudarnya kebudayaan pinisi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman pengrajin sebagai upaya mengembalikan budaya Perahu Pinisi. Konsep Tribina yang dicetuskan oleh Dinas PU merupakan konsep rekomendasi dengan tujuan peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh yaitu aspek fisik dan non-fisiknya sekaligus. Oleh karena itu, rekomendasi penataan dengan konsep tribina merupakan strategi penataan yang sesuai untuk memenuhi tujuan tersebut.

Penyebab utama berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kebudayaan Perahu Pinisi ialah faktor ekonomi. Dengan demikian rekomendasi penataan yang diberikan adalah penataan dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk memwadahi peningkatan perekonomian dan sekaligus mempertahankan kebudayaan, maka penataan menuju kampung wisata budaya merupakan konsep penataan yang mampu mengakomodir kedua tujuan tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi penataan yang diberikan ialah penataan kampung wisata budaya yang dilakukan melalui konsep tribina.

Rekomendasi dilakukan dalam tiga bagian yaitu rekomendasi melalui bina lingkungan fisik, bina ekonomi dan usaha serta bina sosial. Pembinaan lingkungan fisik dilakukan melalui dua tahap berdasarkan peraturan pengembangan daerah pesisir yaitu integrasi matra darat dan laut dan peningkatan pelayanan jaringan. Pada tahapan pertama dilakukan berdasarkan strategi pengendalian kawasan pesisir yaitu normalisasi penggunaan lahan dan rezoning. Strategi pertama dilakukan dengan mengevaluasi kondisi eksisting pembagian zona yang diperoleh melalui hasil analisis elemen *nature*, *man* dan *shell* yaitu analisis kondisi geografis, analisis alur pergerakan pengrajin dan non pengrajin, analisis kepemilikan bangunan/ kavling, dan analisis tatanan permukiman.

Strategi selanjutnya ialah rezoning yang dilakukan dengan mengatur kembali penataan ruang yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi startegi pertama dan disesuaikan dengan kebutuhan tambahan zona area yang diperoleh

dari syarat pemebentukan Kampung Wisata Budaya menurut pengertian kampung wisata budaya dan aspek-aspek yang harus dimiliki kawasan wisata.

Tahapan yang kedua dilakukan ialah peningkatan pelayanan jaringan yang dilakukan dengan melihat hasil analisis kondisi fisik jalan/sirkulasi sehingga dapat diketahui area jalan mana saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk menunjang kebutuhan di kawasan tersebut.

Pembinaan Ekonomi dan Usaha dilakukan dengan melihat potensi ekonomi masyarakat Tanah Beru yang dapat dikembangkan sehingga turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebudayaan Perahu Pinisi. Peningkatan faktor ekonomi bagi pengrajin dilakukan pada tahapan ponggawa dan sawi dengan mengusahakan kelompok pengrajin yang baru. Potensi ekonomi lainnya berupa usaha alternatif pendukung kerajinan Pinisi, usaha penunjang kenyamanan pengunjung wisata kampung budaya, dan alternatif usaha selain pengrajin Perahu Pinisi. Potensi-potensi tersebut diperoleh melalui hasil analisis elemen *society* dan *man* yaitu analisis sosial ekonomi, analisis aktifitas masyarakat dan analisis status kependudukan. Pembinaan yang terakhir ialah pembinaan bidang sosial yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai kecintaan dan kebudayaan Perahu Pinisi yang benar sehingga regenerasi dapat terus berlangsung. Hal ini diperoleh dari hasil analisis karakteristik masyarakat dan analisis aktifitas masyarakat pengrajin Perahu Pinisi pada elemen *society* dan *man*.

### **3.6. Tahap Akhir**

Pada tahapan ini akan disimpulkan proses penelitian secara garis besar mulai dari latar belakang perumusan masalah hingga penyelesaian penelitian hingga mencapai suatu kesimpulan. Dengan adanya hasil akhir ini akan memberikan saran dan masukan berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### Latar Belakang

1. Kebudayaan Pinisi sebagai catatan kebanggaan kejayaan maritim bangsa Indonesia
2. Adanya keterkaitan antara kebudayaan dan pembentukan permukiman melalui aktivitas masyarakat yang berinteraksi di dalamnya.
3. Pengerjaan Perahu Pinisi yang masih menggunakan kemampuan magis menjadikan kebudayaan pinisi memiliki nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan

#### Identifikasi Masalah

1. Isu memudarnya kebudayaan pinisi sebagai warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang ditandai oleh berkurangnya jumlah pengrajinnya, pergeseran ritual adat yang dilakukan, dan berkurangnya partisipasi masyarakat
2. Keberlangsungan Perahu Pinisi sangat dipengaruhi oleh kehidupan berbudaya masyarakat Tanah Beru yang tergambar pada pola-pola ruang permukimannya.
3. Pemerintah Kabupaten Bulukumba saat ini lebih fokus kepada Perahu Pinisi sebagai objek kebudayaan tanpa melibatkan masyarakat Tanah Beru sebagai bagian dari proses kebudayaan Perahu Pinisi.
4. Penelitian mengenai Perahu Pinisi terfokus pada pesisir pantai pembuatan perahu dan dianggap terpisah dengan kesatuan wilayah masyarakat Tanah Beru.

#### Rumusan Masalah

Bagaimanakah pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba sebagai dasar arahan penataan permukiman pengrajin Perahu Pinisi yang sesuai dengan budaya pengrajinnya rangka meningkatkan kualitas permukimannya?

#### Tujuan

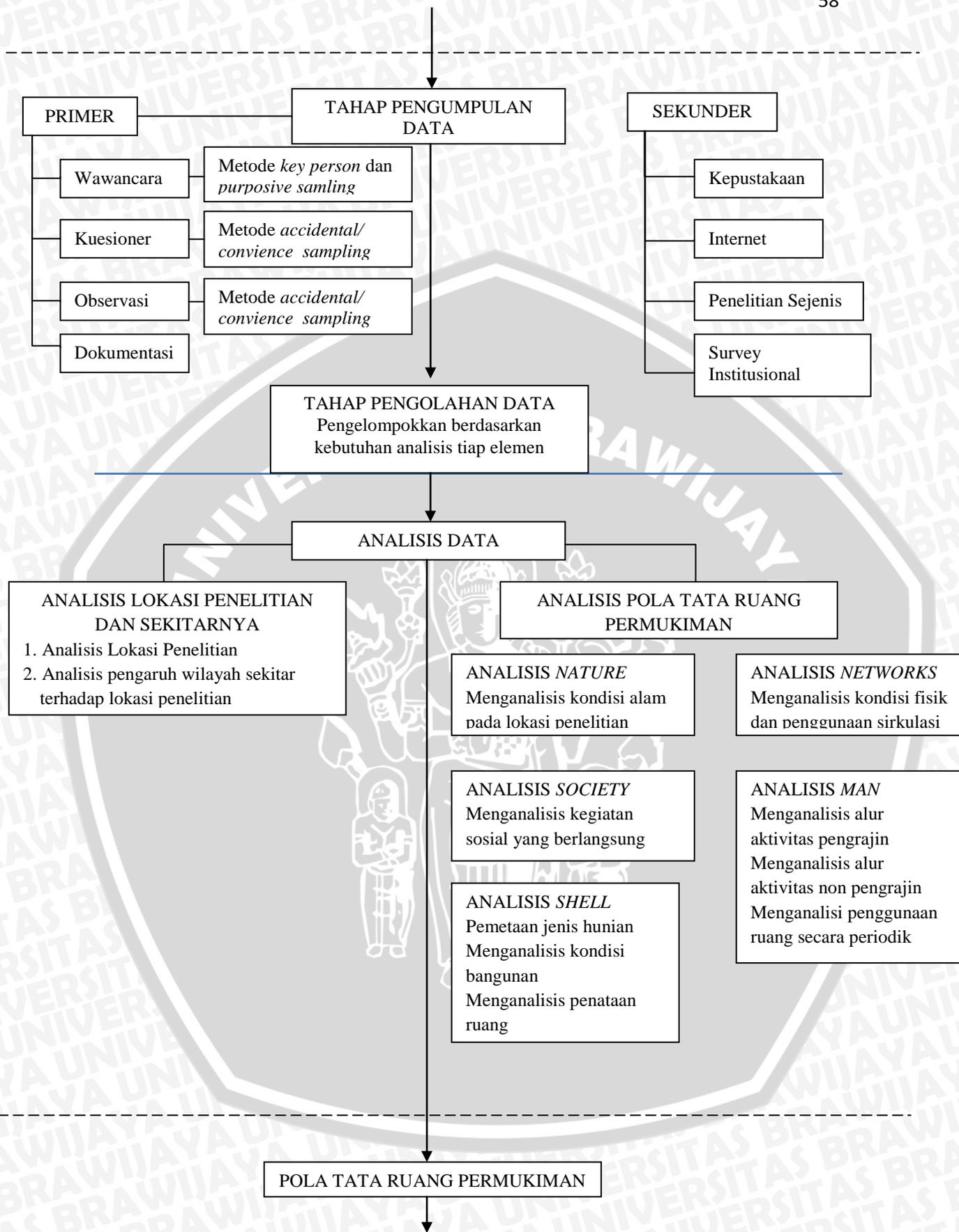
mengetahui pola tata ruang permukiman pengrajin Perahu Pinisi di Bulukumba untuk dijadikan dasar memberikan konsep penataan permukiman pengrajin pinisi dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman pengrajinnya

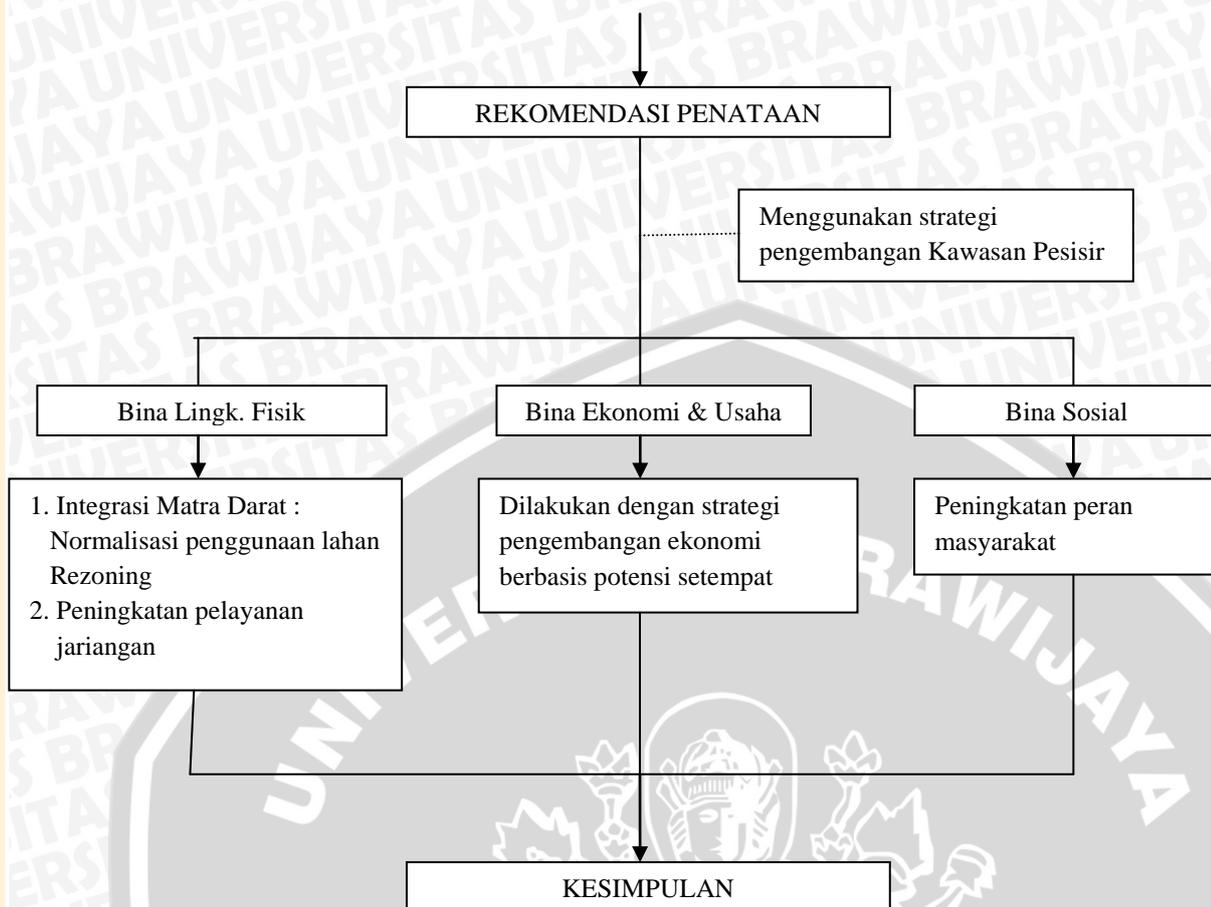
#### TAHAP PENDAHULUAN

##### Studi Penelitian Sejenis

1. Pola Tata Ruang Permukiman Bantaran Sungai Jagir Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
2. Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar

Penentuan lokasi penelitian di Kawasan Industri Kapal Rakyat Tanah Beru, Bulukumba yang dilakukan mengikuti penetapan Kawasan Industri Kapal Rakyat





Gambar 3.5 Kerangka Alur Penelitian